KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAWI DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN KRISIS PANGAN TAHUN 2017

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

LUTHFI WAHID AL AKBAR
18323109

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAWI DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN KRISIS PANGAN TAHUN 2017

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

LUTHFI WAHID AL AKBAR
18323109

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAWI DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN KRISIS PANGAN TAHUN 2017

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
12 Januari 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Hangga Fathana, S.IP., B.Int., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Hangga Fathana, S.IP., B.Int., M.A.	
2	Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.	
3	Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta 15 Januari 2022



Luthfi Wahid Al Akbar

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahi robbil 'alamin, laa haula wa kaa quwwata illa billahi,
Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang tidak henti melimpahkan rahmat, berkah, dan karunia serta hidayahNya sehingga segala kenikmatan, kemudahan dan kelancaran selalu senantiasa tercurah membersamai penulis. Segala kesyukuran hamba haturkan kepadaMu yang Maha Pengasih sehingga karya tulis sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih juga kepada:

Bapak Henri Agus Firmansyah dan Ibu Delly Yanti

Yang telah memberikan doa yang tidak pernah putus dan tak henti-hentinya kepada penulis. Curahan kasih dan sayang yang selalu senantiasa diberikan kepada penulis agar selalu menjadi sosok yang dapat membanggakan dan bermanfaat bagi banyak orang. Bimbingan serta nasihat yang selalu diberikan kepada penulis agar selalu dapat menjadi sosok yang baik dan berbakti. Terima kasih atas segala dukungan serta motivasi yang senantiasa menuntut penulis hingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Semoga Allah tidak henti-hentinya menjaga dan membersamai kalian agar selalu senantiasa berada dalam lindunganNya, *aamiin Allahumma aamiin*.

Seluruh Teman Baik

Yang selalu dengan setia mendengarkan, memberi nasihat, dukungan dan doa yang tidak hentinya kepada penulis. Segala dukungan dan nasihat teman-teman semua semoga bermanfaat bagi penulis. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melindungi dan menjaga kita semua agar selalu berada dalam lindunganNya, *aamiin ya robbal alamiin*.

HALAMAN MOTTO

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi." – (Q.S Al-Qashas: 77)

"Tidak pernah ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak. Tetapi, kita harus memilihnya. Kita pilih yang paling tepat."
-Susilo Bambang Yudhoyono-

"*Education is the most powerful weapon which you can use to change the world*."
-Nelson Mandela-

"Masa depan adalah milik mereka yang telah mempersiapkannya pada hari ini."
-Luthfi Wahid Al Akbar-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahi robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulisan karya tulis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam juga selalu teriring kepada baginda Rasulullah SAW yang telah berhasil membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis juga tidak akan mampu menyelesaikan karya tulis ini tanpa dukungan dan bantuan dari *support system* yang tidak kenal lelah dan henti memberikan masukan, dukungan, nasihat, dan bantuan, serta doa yang baik bagi penulis. Kebaikan kalian semua tidak dapat penulis bayarkan dengan bantuk apapun, hanya berharap berkah dan pahala dari Allah SWT kepada kalian yang tiada henti memberikan kebaikannya kepada penulis. Untuk itu, penulis memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi nama-nama di bawah ini dengan kalimat yang sederhana dari penulis:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., M.Ag., Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan banyak masukan, nasihat, koreksi, serta bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini. Banyak sekali masukan dan nasihat yang sangat berguna bagi penulis untuk dapat menghadapi berbagai macam tantangan kedepan. Semua bentuk koreksi yang semata-mata demi

kebaikan penulis telah membuat penulis menjadi semakin lebih baik dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala motivasi dan dukungan kepada penulis.

3. Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang tiada hentinya mengingatkan untuk menjadi pribadi yang berguna bagi khalayak. Terima kasih juga diucapkan atas kesempatannya menjadi tutor dalam mata kuliah yang ibu ampu, pengalaman serta ilmu yang ibu berikan semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi.
4. Miss Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int, M.A., terima kasih atas kesempatannya menjadi bagian tutor dalam mata kuliah yang Miss Itoh ampu, semoga ilmu dan bimbingan yang telah diberikan menjadi menfaat yang tidak terhingga bagi saya.
5. Segenap dosen program studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, atas didikan dan bimbingan selama mengikuti masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi panutan yang memberikan banyak sekali inspirasi serta motivasi yang sangat berguna bagi saya dan teman-teman prodi Hubungan Internasional lainnya.
6. Mbak Mardiatul Khasanah, selaku staf program studi Hubungan Internasional yang telah sudi menjadi tempat bertanya dalam berbagai kesulitan maupun hambatan selama menjadi bagian dari mahasiswa prodi Hubungan Internasional hingga saat tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Henri Agus Firmansyah dan Ibu Delly Yanti, terima kasih atas segala bentuk kasih sayang dan cinta yang telah kalian berikan kepada

penulis. Doa dan harapan baik selalu senantiasa tercurah disetiap sujud dan pintamu semata-mata demi kebahagiaan dan keberhasilan penulis. Segala bentuk cinta kasih yang telah kalian berikan kepada penulis sejak diwaktu kecil hingga saat ini tidak akan pernah dapat penulis bayar dalam bentuk apapun. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, kekeliruan, dan sikap yang kurang berkenan dihati Bapak dan Ibu. Mohon maaf juga penulis sampaikan jika masih banyak mengecewakan kalian, namun percayalah bahwa suatu saat nanti penulis akan dapat membanggakan kalian dengan semua prestasi yang mampu penulis raih hingga dapat meningkatkan derajat kalian. Terima kasih atas semua yang telah diberikan, cinta kasih, dan doa baik dari kalian pahlawanku.

8. Tari Janesa Karunia, sebagai *support system* yang selalu hadir tanpa diminta, terima kasih telah sudi menjadi teman diskusi, berdebat, berkeluh, bermimpi, dan berharap. Terima kasih telah membersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka. Bantuan yang telah diberikan dalam berbagai hal termasuk dalam proses penulisan tugas akhir ini akan selalu penulis ingat sepanjang hayat. Tetaplah menjadi saksi dari kesuksesan penulis dan tetaplah menjadi sosok yang bisa saling mengisi dalam berbagai keadaan. Semangat dalam menempuh harapan yang lebih indah setelah ini.
9. Alm H. Abdul Manap dan Hj. Royanah, sosok yang sangat berperan dalam pembangunan karakter penulis sedari kecil. Terima kasih atas ilmu dan pendidikan yang telah kalian berikan, terima kasih telah sudi merawat dan menjaga penulis ketika orang tua sedang jauh. Semoga Alm ditempatkan disisi terbaikNya dan bagi Nenek Hj. Royanah dapat

selalu dalam keadaan sehat *wal 'afiat* dan selalu dalam lindunganNya, *aamiin.*

10. Keluarga besar Manap *Family*, saksi hidup penulis sejak kecil hingga saat ini yang selalu mendoakan dan mendukung seluruh jalan yang penulis lalui.
11. Kak Asy Syifa Dwinanda Tohirin, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan masukan selama proses penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Rasa syukur penulis sampaikan karena telah membimbing dan membantu agar proses penulisan tugas akhir ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas doa dan dukungannya kepada penulis. Semoga kak Syifa sukses selalu dalam langkah yang dilalui dan semoga cita-cita untuk dapat berkuliah diluar negeri dapat terwujud, *aamiin.*
12. Aldila Nurin Khadijah, Medi Alansyah, Muhammad Aldyansyah, Nada Zakiah, Utari Lola Yolanda, dan Yudha Satria Saputra (*nine*), sebagai sahabat terbaik yang selalu menjadi penyemangat dan pemberi motivasi bagi penulis. Terima kasih atas semua doa dan nasihat yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga segala cita-cita yang pernah disusun bersama dapat terwujud dan selalu dimudahkan oleh Allah SWT, *aamiin.*
13. Febby Wijayanti, Nanda Raynaldi Sofyan, dan Anggun Setia Yoanda, sebagai sesama pejuang kesuksesan, sebagai sesama pejuang tugas akhir, sesama pejuang masa depan, dan sesama pejuang rantau. Terima kasih atas segala doa, bantuan, dukungan, dan nasihat yang telah kalian berikan kepada penulis. Terima kasih karena telah selalu ada disaat

penulis membutuhkan. Semoga doa dan harapan yang pernah kita sampaikan dapat terwujud dan selalu dimudahkan olehNya.

14. Aida, Anita, Apip, Britania, Caesar, Chairani, Ega, Hafizh, Luthfi, Naufal, Nindi, Prili, Rudyana, Saadah, Tanaya, dan Tito (*PYB*), Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan. Terima kasih telah mendoakan yang terbaik bagi penulis. Tak lupa, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kalian semua yang telah sudi menerima dengan tangan terbuka ketika penulis sendiri pada awal masa perkuliahan. Semangat untuk kalian semua dalam meraih kesuksesan. Semoga keberkahan dan keselamatan selalu tercurah kepada kalian semua, *aamiin*. Nama kalian akan selalu ada dalam hati penulis.
15. Muhammad Arif Idris, teman yang selalu berjuang bersama sedari kecil hingga saat ini. Terima kasih atas semua bimbingan dan masukannya sehingga penulis dapat berkuliah di Universitas Islam Indonesia kampus *Rahmatan Lil Alamin.* Terima kasih telah memberi tumpangan ketika penulis masih menjadi camaba hingga menjadi maba. Semoga sukses selalu dalam meraih seluruh impianmu dan semoga keberkahan maupun keselamatan selalu tercurah kepadamu.
16. Keluarga Besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya periode 2019 dan 2021 khususnya Departemen Advokasi Politik, sebagai wadah bagi penulis dalam berproses dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan kampus.

17. Seluruh rekan-rekan mahasiswa prodi Hubungan Internasional angkatan 2018. Semoga kalian semua menjadi insan yang sukses dan membanggakan dimanapun kalian berada.
18. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata *Online* Unit 251 angkatan 63 tahun 2021.
19. Dan seluruh pihak yang telah membantu dan melancarkan jalannya penelitian tugas akhir ini, bantuan sekecil apapun akan sangat berharga bagi penulis. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan keberkahan dan keselamatan oleh Allah SWT, *aamiin*. *See you again!*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 10 Januari 2022

Luthfi Wahid Al Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GRAFIK xv
DAFTAR DIAGRAM xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR SINGKATAN xviii
ABSTRAK xix
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Signifikansi penelitian 7
1.5 Cakupan Penelitian 9
1.6 Tinjauan Pustaka 9
1.7 Kerangka Pemikiran 13
1.8 Metode Penelitian 20
1.8.1 Jenis Penelitian 20
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 20
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 21
1.8.4 Proses Pengumpulan Data 21
BAB 2 BENCANA KEKERINGAN DAN KRISIS PANGAN MALAWI 23
2.1 Bencana Kekeringan di Malawi Tahun 2015-2017 23
2.2 Krisis Pangan Malawi 26
2.2.1 Dampak Krisis Pangan bagi Masyarakat 26
2.2.2 Upaya Negara dalam Menghadapi Krisis Pangan 30
BAB 3 KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAWI DALAM MENGHADAPI KRISIS PANGAN 38
3.1 Aplikasi Teori 40
3.2 Analisis Konteks Studi Kasus 43
3.2.1 Faktor Internal dalam Pengambilan Kebijakan Krisis Pangan Malawi 43
3.2.2 Struktur Sosial dan Perilaku Masyarakat Malawi 44
3.2.3 Proses Pengambilan Kebijakan dalam Krisis Pangan Malawi 47
3.2.4 Tindakan Pemerintah dalam Krisis Pangan Melawi 51
3.2.5 Faktor Eksternal dalam Pengambilan Kebijakan Krisis Pangan Malawi 55
BAB 4 PENUTUP 58
4.1 Kesimpulan 58
4.2 Rekomendasi 61
DAFTAR PUSTAKA 62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aplikasi Teori 40
Tabel 2. Kebijakan Pemerintah 54

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Angka Distribusi Kebutuhan Pangan Berdasarkan Wilayah 27

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. *The Decision Making Model* 15
Diagram 2. Aplikasi Teori *Decision Making Model* 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Penurunan Curah Hujan pada Provinsi Malawi Tahun 2016 25

DAFTAR SINGKATAN

AU	:	*African Union*
DCCMS	:	*Department of Climate Change and Meteorological Services*
DPP	:	*Democratic PProgressiveParty*
DRR	:	*Disaster Risk Reduction*
EWS's	:	*Early Warning Systems*
FAO	:	*Food and Agriculture Organization*
HIV-AIDS	:	*Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immunodeficiency Syndrome*
IGO's	:	*Intergovernmental Organizations*
ISPA	:	Infeksi Saluran Pernapasan Akut
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MRCS	:	*Malawi Red Cross Society*
NAPA	:	*National Adaptation Programme of Action*
NGO's	:	*Non-governmental Organizations*
SADC	:	*South Africa Development Community*
SDG's	:	*Sustainable Development Goals*
TBC	:	*Tuberculosis*
UNHCR	:	*United Nations High Commissioner for Refugees*
UNICEF	:	*United Nations International Children's Emergency Fund*
USD	:	*United States Dollar*
WFP	:	*World Food Programme*
WHO	:	*World Health Organization*

ABSTRAK

Pemerintah Malawi telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menyelesaikan persoalan krisis pangan berkepanjangan di negara *landlock* tersebut. Berbagai faktor juga sangat diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang bersifat penting dan strategis demi membuat situasi kembali dapat teratasi dengan cepat dan tepat. Langkah cepat dilakukan pemerintah Malawi bersama pihak-pihak terkait lainnya diharapkan mampu memberikan ketenangan bagi seluruh masyarakat Malawi. Masyarakat tentu menginginkan langkah yang tepat yang dilakukan pemerintah Malawi untuk membuat Malawi dapat kembali kondusif seperti sedia kala. Faktor terpenting dalam proses perumusan kebijakan pada situasi krisis tersebut adalah faktor internal Malawi, maka dari itu pentingnya hubungan yang bersifat sinergi antara pemerintah dan Masyarakat dalam proses pemulihan situasi krisis. Penulis akan mengulas proses perumusan kebijakan dalam upaya penyelesaian krisis pangan tersebut ditinjau melalui Teori Proses Pembuatan Kebijakan (*The Decision Making Process*) oleh Richard C. Snyder. Dalam teori tersebut diperlukan untuk dapat memperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhi dalam proses perumusan kebijakan. Riset ini juga dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor-faktor yang diperhatikan oleh pemerintah Malawi dalam merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan krisis pangan yang mempengaruhi keamanan kesehatan.

Kata Kunci: Malawi, Pemerintah Malawi, krisis pangan, kebijakan, teori proses pembuatan kebijakan

ABSTRACT

The Malawian government has made various efforts to solve the problem of the prolonged food crisis in the landlocked country. Various factors are also highly considered in the process of formulating important and strategic policies to make the situation resolved quickly and precisely. The quick steps taken by the Malawian government together with other relevant parties are expected to be able to provide peace for all Malawian people. The public certainly wants the right steps taken by the Malawian government to make Malawi able to return to being conducive as before. The most important factor in the policy formulation process in a crisis is Malawi's internal factors, therefore the importance of a synergistic relationship between the government and the community in the process of recovering from a crisis. The author will review the policy formulation process to resolve the food crisis in terms of The Decision Making Process Theory by Richard C. Snyder. In this theory, it is necessary to pay attention to various factors that will influence the policy formulation process. This research was also conducted to determine the various factors that are considered by the Malawian government in formulating policies to resolve the food crisis that affects health security.

Keywords: *Malawi, Malawian government, food crisis, policy, the decision making process theory*

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan sebuah kebutuhan manusia yang bersifat primer (utama) dan akses untuk menjangkaunya wajib untuk dipenuhi oleh negara. Pemenuhan pangan telah diatur di dalam berbagai aturan yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggungjawab negara yang harus diutamakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pangan adalah sumber utama terhadap kebutuhan energi bagi setiap manusia sebagai salah satu penunjang seseorang untuk dapat beraktivitas dengan baik tanpa adanya gangguan dan hambatan. Kebutuhan terhadap pangan merupakan hal yang mutlak dijamin oleh siapapun termasuk di dalamnya adalah negara, karena dengan mudahnya akses menuju makanan, maka diharapkan banyak orang yang memiliki jiwa yang sehat dan energi tubuh yang cukup.

Pentingnya terhadap pangan juga tidak hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan energi bagi tubuh, namun juga sebagai sumber pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia terutama bagi anak-anak dan perempuan yang sangat perlu untuk dicukupi kebutuhan pangan mereka agar dapat terhindar dari berbagai situasi yang rentan dan beresiko tinggi terhadap penularan penyakit. Kandungan yang terdapat di dalam makanan (pangan) mengandung nilai nutrisi yang sangat berguna bagi tubuh, oleh karena itu akses dan pemenuhannya wajib untuk diberikan kemudahan dan dijamin dengan baik oleh penyelenggara negara. Akses yang mudah terhadap

makanan (pangan) yang aman dan bernutrisi tentunya sebagai kunci bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan mampu beraktivitas dengan baik sebagaimana mestinya (Lestari, 2020). Pangan bagi manusia tidak hanya berbicara mengenai akses dan kemudahannya, namun juga membahas mengenai makanan yang aman dan sehat, karena makanan (pangan) selalu berjalan berdampingan dengan kesehatan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dewasa ini keamanan pangan dunia tengah menjadi pembahasan yang menyita perhatian banyak pihak, karena pangan sangat bergantung pada kondisi alam yang pada saat ini sedang berubah-ubah dan cenderung kurang stabil (Ala, n.d.). Kondisi tersebut diperparah dengan situasi iklim global yang saat ini tengah menjadi pusat perhatian akibat dari pemanasan global yang sedang terjadi diseluruh dunia. Keamanan pangan tentunya tidak hanya bergantung pada kondisi alam semata, namun juga peran dari kondisi sosial ekonomi masyarakat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap ketersediaan pangan yang aman dan sehat, seperti halnya yang terjadi di Afrika saat ini yang memiliki persoalan yang sangat kompleks terhadap kasus keamanan pangan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kondisi alam di Afrika cukup beragam, seperti pada kawasan Utara Afrika yang memiliki keadaan alam yang cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman pangan, namun keadaan tersebut berbanding terbalik jika kita melihat kondisi di wilayah Selatan Afrika dengan kondisi bentang alam yang kering dan tandus. Keadaan tersebut menjadi semakin sulit ketika diiringi dengan situasi sosial ekonomi masyarakat di Afrika yang rentan terjadi konflik antar suku

dan antar saudara. Hal ini yang kemudian membuat ketersediaan pangan yang aman dan layak konsumsi menjadi sangat mahal dan langka bagi sebagian penduduk di Afrika.

Malawi merupakan sebuah negara kecil di wilayah Selatan benua Afrika yang masih sangat jarang terjamah oleh banyak pihak dikarenakan masih banyak kalangan yang mengenal hanya Afrika hanya sebatas Afrika Selatan, Nigeria, Somalia, dan Kamerun yang negara-negara tersebut cukup familiar di telinga kita semua, padahal terdapat salah satu negara di kawasan Afrika yang masih sangat minim perhatian dari dunia luar. Malawi memiliki persoalan keamanan pangan yang cukup berat, kondisi bentang alam di Malawi tidak seberuntung negara lain, meskipun memiliki sebuah danau besar yang hampir meliputi seluruh wilayah negara, namun pengelolaan danau dan ketersedian air di Malawi cukup memprihatinkan. Akibatnya banyak lahan pertanian yang tidak mampu teraliri air dengan baik yang kemudian membuat bahan pangan terasa cukup mahal di Malawi. Keadaan tersebut sebetulnya telah melanda Malawi sejak dipenghujung tahun 2015 hingga pada Oktober 2016. Penyebabnya dikarenakan adanya dampak akibat fenomena El Nino yang mulai dirasakan oleh Malawi hingga menyebabkan kekeringan berkepanjangan dan terjadinya penurunan intensitas curah hujan tahunan secara signifikan. Kondisi tersebut kemudian membuat krisis pangan berkepanjangan di Malawi yang membuat banyak masyarakat setempat menderita dan mengalami kondisi gizi yang buruk.

Menurut data FAO, angka krisis pangan di Malawi cukup tinggi sejak akhir tahun 1990 hingga 2002, kemudian fase berikutnya terjadi sejak

tahun 2005 hingga tahun 2018, angka krisis pangan di Malawi masih cenderung tinggi (Food Agriculture Organization, n.d.). Malawi berada dalam situasi yang memprihatinkan dalam persoalan ketahanan pangan. Sejak tahun ke tahun situasi tersebut yang juga menjadi persoalan bagi Malawi untuk sulit keluar dari jurang kemiskinan. Kemampuan dalam memproduksi pangan pada situasi krisis pangan tahun 2015-2017 bagi Malawi hanya mampu mencatatkan angka sebesar 4000 ton per tahun. Angka tersebut tentu sangat minim jika diperuntukkan bagi 19,6 juta penduduk Malawi (Food Agriculture Organization, n.d.).

Sebetulnya Malawi bukanlah satu-satunya negara di Afrika yang seringkali dilanda bencana kekeringan dan krisis pangan. Ketidak beruntungan terhadap kondisi geografis menjadi persoalan utama oleh sebagian negara yang mengalami persoalan tersebut. Setidaknya tercatat terdapat beberapa negara yang juga mengalami kondisi serupa, yaitu Mozambik dan Nigeria (Monica Fisher, 2015). Akan tetapi, situasi yang dihadapi oleh kedua negara tersebut jauh lebih cepat dapat teratasi karena memiliki sejumlah keunggulan dari sisi finansial dan sumber daya manusia yang mampu membuat kedua negara tersebut dapat dengan cepat keluar dari masa sulit akibat adanya krisis pangan. Mozambik memiliki hubungan kedekatan dengan Afrika Selatan sebagai salah satu raksasa ekonomi benua hitam, sehingga ketika masa sulit tersebut melanda, bantuan melalui Afrika Selatan dengan cepat masuk dan membuat pemerintah Mozambik dapat mengatasi persoalan krisis pangan dengan cepat. Kemudian, Nigeria juga merupakan salah satu raksasa ekonomi di Afrika, sehingga dengan semua

sumber daya yang dimilikinya, membuat Nigeria tidak perlu waktu lama dalam menyelesaikan situasi krisis tersebut untuk dapat kembali kondusif. Kedua hal tersebut yang kemudian tidak ikut dirasakan oleh Malawi, mereka masih dihadapkan pada situasi dibawah garis kemiskinan yang kemudian menempatkan negara ini berada pada posisi 196 dunia dari total 201 negara. Hal lainnya adalah, sebetulnya Malawi memiliki sejumlah potensi terhadap ketersedian suplai air bagi kecukupan pengairan lahan pertanian masyarakat, akan tetapi pengelolaan terhadap danau Nyasa (danau Malawi) belum mampu dikelola dengan baik sehingga ketika kondisi kekeringan dan krisis pangan melanda yang membuat Malawi sulit dalam mengakhiri situasi tersebut (Solomon Asfaw, 2015).

Kondisi gizi buruk atau malnutrisi tersebut membuat Malawi semakin terpuruk dan terbelakang. Akibatnya, angka penularan penyakit semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuat Malawi menduduki peringkat 21 dunia dalam hal persoalan malnutrisi dengan rata-rata kasus sebesar 22,55% (World Health Organization, n.d.). Malnutrisi umumnya diderita oleh anak-anak karena diusia anak-anak yang seharusnya mendapat asupan pangan yang bernutrisi untuk keberlangsungan hidup dan pertumbuhannya di masa yang mendatang. Akan tetapi, pada dasarnya kondisi tersebut dapat saja dihindari ketika perempuan yang tengah mengandung dapat memperoleh nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembang bayi hingga pada saat masa kelahiran, anak-anak tersebut memiliki cukup nutrisi yang mampu menopang tumbuh kembangnya pasca kelahiran. Namun, pada realitanya banyak anak-anak dan perempuan di Malawi

mengalami kondisi kekurangan asupan pangan yang bernutrisi, akibatnya angka kesehatan di Malawi mengalami penurunan yang cukup signifikan yang semakin memperparah keadaan domestik di Malawi (Kalinga, n.d.).

Melihat kondisi yang terjadi di Malawi akibat adanya krisis pangan yang pada akhirnya menyebabkan gangguan terhadap keamanan kesehatan bagi masyarakat Malawi, hal ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah negara untuk mengupayakan program perlindungan dan penanggulangan keamanan kesehatan. Malawi merupakan sebuah negara yang masih sangat minim terkait dengan fasilitas kesehatan dan jaminan kemudahan bagi penduduknya untuk mengakses fasilitas kesehatan tersebut, maka dari itu penting untuk dilihat bagaimana peran negara dalam menghadapi ancaman keamanan kesehatan tersebut yang merupakan imbas dari adanya krisis pangan berkepanjangan di Malawi pada tahun 2017 tersebut. Jaminan terhadap kemudahan penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan merupakan hal yang wajib untuk dikedepankan oleh negara sebagai pemangku kepentingan seluruh masyarakat di Malawi. Dalam mempermudah negara untuk dapat menjamin pemenuhan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Malawi, pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan keanggotaan mereka di organisasi regional Uni Afrika (AU) dan SADC dalam bekerja sama untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat berupa pangan dan kesehatan yang wajib dikedepankan oleh negara sebagai suatu otoritas yang berwenang untuk menjamin hak dasar manusia tersebut. Upaya kerjasama ini sesuai dengan amanat dan tujuan dari Uni Afrika (AU) yaitu untuk memajukan dan mengkoordinasikan berbagai

kerjasama dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermartabat untuk bangsa-bangsa Afrika.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, penelitian kali ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan oleh pemerintah Malawi dalam perumusan kebijakan penyelesaian persoalan krisis pangan pada tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses perumusan kebijakan pemerintah Malawi dalam menyelesaikan persoalan krisis pangan pada tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Malawi dalam menyelesaikan persoalan krisis pangan pada tahun 2017.

1.4 Signifikansi Penelitian

Pangan merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat mendasar bagi seluruh manusia yang bertujuan sebagai sumber tenaga yang dapat menunjang aktivitas dan mobilisasi manusia. Berbicara tentang pangan tidak hanya membahas mengenai jenis makanan yang dikonsumsi oleh manusia, namun juga berbicara mengenai apakah makanan yang dikonsumsi tersebut adalah makanan yang layak dan bergizi untuk menunjang kebutuhan dasar manusia. Ketersediaan pangan yang layak bagi kemanusiaan merupakan tanggung jawab negara sebagai suatu otoritas yang menghimpun hajat hidup orang banyak di suatu negara (Lestari, 2020, hal 62). Pada penelitian kali ini

akan membahas mengenai krisis pangan yang berkepanjangan di Malawi pada tahun 2017 yang ternyata menjadi sebuah malapetaka bagi kehidupan masyarakat di Malawi. Dengan krisis pangan yang terjadi tersebut akan berdampak pada stabilitas keamanan manusia terutama pada aspek keamanan kesehatan masyarakat, karena dengan makanan yang layak dan bergizi akan membuat masyarakat menjadi lebih sehat dan kehidupan mereka menjadi lebih baik, namun dengan apa yang terjadi di Malawi tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa krisis pangan akan berdampak signifikan terhadap stabilitas keamanan manusia.

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia pada saat ini, terlebih ketika banyaknya wabah penyakit yang mudah sekali menyebar dengan cepat di antara manusia. Manusia yang sehat akan dengan sangat mudah untuk dapat hidup yang lebih layak, dapat beraktivitas dengan baik tanpa suatu gangguan yang mengancam, dan dengan manusia yang sehat akan menjadi pemicu bagi manusia untuk dapat mencukupi kebutuhan lainnya seperti kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan sosial, dan masih banyak aspek lainnya yang dapat terpenuhi jika kondisi manusia berada pada status keadaan yang sehat. Isu yang diangkat pada penelitian ini sejalan dengan disiplin ilmu hubungan internasional terkait dengan upaya negara dalam menjamin terciptanya keamanan manusia khususnya pada aspek keamanan kesehatan yang tertuang didalam prinsip keamanan manusia *responsibility to protect and provide.*

1.5 Cakupan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh krisis pangan terhadap keamanan kesehatan di Malawi dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan upaya pemerintah Malawi dalam menyelesaikan persoalan krisis pangan tersebut. Oleh sebab itu, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada saat di mana kasus krisis pangan ini melanda Malawi hingga menyebabkan banyaknya masyarakat menjadi imbas dari krisis tersebut. Pada tahun 2017 adalah menjadi tahun krisis pangan di wilayah Malawi akibat efek dari kekeringan berkepanjangan di Afrika bagian Selatan. Pengambilan tahun 2017 dimaksudkan pada rilis data *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang menyatakan bahwa Malawi pada tahun 2017 mengalami situasi krisis pangan yang berkepanjangan akibat bencana kekeringan yang melanda Malawi sejak penghujung tahun 2015 hingga akhir 2016. Kemudian, pada awal tahun 2017 pemerintah Malawi juga mulai mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat penting dan strategis dalam upaya menyelesaikan situasi krisis pangan tersebut.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari tentang "*Penyelenggaraan Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Hak Masyarakat Sebagai Konsumen*" menjelaskan mengenai keamanan pangan sebagai sumber kebutuhan dasar yang berguna untuk menjaga kestabilan kehidupan masyarakat baik untuk memenuhi aspek kesehatan maupun aspek lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa

ketersediaan pangan yang layak dan memenuhi kriteria baik dikonsumsi merupakan upaya untuk tetap menjaga nilai-nilai hak asasi manusia dapat selalu terpenuhi dengan baik tanpa adanya gangguan maupun hambatan yang mempengaruhi keamanan manusia (Lestari, 2020, hal 50).

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Sulfitri Hs. Mudrieq tentang "*Problematika Krisis Pangan Global*" menguraikan tentang krisis pangan global yang berkepanjangan di seluruh dunia dirasakan oleh seluruh negara terutama negara-negara di Afrika dan Asia. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan negara yang akan menopang kebutuhan nasional dalam menjamin pemenuhan pangan yang layak, kemudian diperparah oleh adanya degradasi hutan yang telah berubah dan beralih fungsi menjadi perumahan, perkantoran, industri, dan akibat lainnya. Pada kondisi di Afrika akan semakin kompleks ketika situasi yang terjadi di benua Afrika terutama dari sisi geografisnya yang kurang produktif untuk ditanami oleh tanaman pangan, tentunya akan membuat persoalan krisis pangan akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi negara-negara di Afrika (Mudrieq, 2014, hal 1288). Menyikapi uraian di atas, kondisi tersebut menjadi sangat sulit terutama bagi negara seperti Malawi dengan kondisi keuangan dan pendapatan negara yang tidak stabil ditambah dengan adanya situasi geografis Malawi yang kurang produktif untuk bercocok tanam. Akibatnya, krisis pangan global dirasakan oleh masyarakat Malawi hingga menjadikan negara miskin ini semakin terpuruk dengan kondisi dan realita yang terjadi.

Pada buku yang ditulis oleh Taufiqurokhman dengan judul "*Kebijakan Publik*" penulis menguraikan mengenai arti dari sebuah kebijakan

yang dilakukan oleh pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara yang harus memperhatikan kebutuhan masyarakatnya agar tidak mengalami sejumlah permasalahan ketika pengimplementasiannya di lapangan. Kebijakan diambil sebagai salah satu langkah yang untuk mewujudkan suatu rencana dalam sebuah implementasi yang lebih baik dan lebih komprehensif terhadap tujuan atau rencana tersebut. Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya harus berdasarkan terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakatnya. Hal ini bertujuan agar segala rencana yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu menyerap segala kebutuhan yang akan diberikan kepada rakyatnya (Taufiqurokhman, 2014, hal 3).

Pada buku yang berjudul "*Kesejahteraan Sosial*" ditulis oleh Isbandi Rukminto Adi, menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh otoritas seperti negara yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan dan taraf hidup manusia di suatu negara yang lebih baik dan lebih terkendali dari berbagai kondisi negatif. Kesejahteraan sosial dapat dikatakan berhasil ketika negara mampu menjamin pemenuhan kebutuhan baik secara materi, spiritual dan sosial masyarakat yang terkendali, karena dengan terpenuhinya ketiga aspek tersebut maka keadaan sosial masyarakat menjadi lebih stabil dan masyarakat mampu untuk melaksanakan segala aspek kehidupan sosial yang lebih baik tanpa adanya hambatan. Hambatan yang dimaksud adalah terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial yang kelima aspek tersebut hanya dapat dipenuhi ketika negara melalui kebijakannya mampu untuk

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa pemenuhan pangan yang layak dan baik untuk dikonsumsi (Adi, 2019, hal 8).

Pada buku yang ditulis oleh Caroline Thomas dengan judul "*Global Governance, Development, and Human Security*" menjelaskan bahwa tantangan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang akan semakin kompleks dikarenakan ancaman keamanan tidak hanya sebatas pada ancaman yang akan dihadapi oleh negara melalui ancaman tradisional (militer), namun juga ancaman terhadap manusia yang mendiami negara tersebut. Tantangan kedepan menjadi semakin sulit dikarenakan situasi global saat ini semakin tanpa batas, maka dengan demikian ancaman keamanan manusia juga semakin serius untuk tetap perlu diperhatikan. Ada beberapa konsep ancaman keamanan manusia diantaranya mengenai keamanan pangan dan keamanan kesehatan. Kedua aspek tersebut menjadi sangat penting karena sangat dekat terhadap hajat hidup orang banyak. Ketika keamanan pangan dapat terpenuhi dengan baik dan layak, tentunya keamanan kesehatan juga dapat terjaga dengan baik pula. Hal ini seolah menjadi efek domino, ketika kedua aspek tersebut mampu terjaga dan tercapai dengan baik, tentunya akan membuat manusia akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terkait ekonomi, pendidikan, bersosial, dan masih banyak aktivitas lainnya akan dimudahkan apabila keamanan pangan dan keamanan kesehatan mampu terjaga dengan baik (Thomas, 2000, hal 7).

Pada penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap dari beberapa literatur yang telah ada. Penelitian ini difokuskan untuk membahas mengenai kebijakan pemerintah Malawi dalam menyelesaikan krisis pangan yang pada

tahun 2017 dengan menggunakan sudut pandang dari teori pembuatan kebijakan (*decision making*) yang sangat menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara melalui pembuatan kebijakan yang bersifat stategis dalam mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Dengan menggunakan sudut pandang teori *decision making* tersebut diharapkan negara mampu mengeluarkan berbagai kebijakan yang strategis dalam berupaya untuk menyelesaikan persoalan krisis pangan yang berdampak pada ketidakstabilan keamanan kesehatan di Malawi.

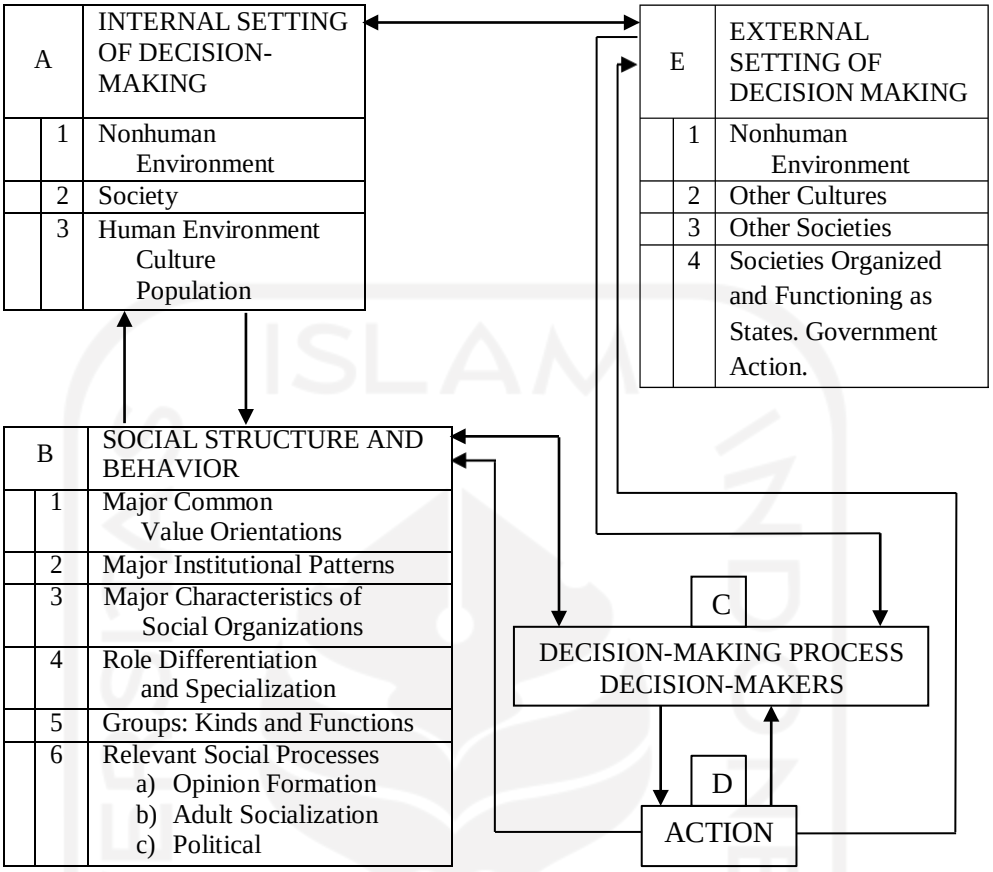
1.7 Kerangka Pemikiran

Teori *decision making* atau yang kita kenal dengan istilah teori pembuatan kebijakan merupakan sebuah teori/konsep yang berbicara mengenai perumusan kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu pihak sebagai *decision makers* untuk merumuskan suatu implementasi yang memiliki urgensi dalam mengakomodasi kepentingan banyak pihak, termasuk di dalamnya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang mendiami suatu wilayah. Menurut Richard Snyder dalam bukunya yang berjudul *Foreign Policy-Decision Making* menjelaskan definisi dari *decision making* yaitu suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengetahui perilaku pemerintah suatu negara di dalam tatanan hubungan internasional (Richard C. Snyder, 2002, hal 85). Perumusan kebijakan dalam tatanan hubungan internasional sangat erat kaitannya terhadap suatu tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dalam menyikapi berbagai persoalan di negaranya

yang kemudian mengharuskan pemerintah untuk dapat menentukan langkah dan pilihan yang strategis dalam menyikapi berbagai persoalan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh aktor hubungan internasional biasanya berdasarkan pada fenomena dan keadaan yang sedang terjadi. Keadaan yang sedang terjadi tersebut biasanya dapat memudahkan aktor dalam merumuskan berbagai kebijakan karena dihadapkan pada situasi dan keadaan yang memaksa seorang aktor harus mengeluarkan kebijakan dalam menghadapi sejumlah persoalan internasional tersebut. Pengambilan keputusan dilatar belakangi oleh niat dalam mencapai sesuatu sehingga kebijakan tersebut dinilai sangat penting untuk dapat mencapai tujuan maupun niat tertentu. Seperti pada contohnya ketika Perang Dingin terjadi yang kemudian membuat tatanan global menjadi terganggu sehingga membuat banyak negara harus menentukan sikap dalam menghadapi persoalan tersebut. Banyak negara melalui pemerintahnya yang kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menghalau sejumlah kemungkinan adanya perkembangan paham sosialis-komunis dan banyak negara yang kemudian juga mengeluarkan kebijakannya untuk membantu negara-negara yang terdampak pada Perang Dingin yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan global. Kedua contoh di atas selaras terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Snyder yang mengungkapkan bahwa pengambilan kebijakan setidaknya memiliki dua aspek utama yakni, mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal dari negara-negara tersebut (Richard C. Snyder, 2002, hal 86).

Diagram 1. *The Decision Making Model*



Sumber: (Richard C. Snyder, 2002)

Snyder mengklasifikasi faktor-faktor utama dalam sebuah pengambilan dan perumusan kebijakan tersebut sebagai berikut:

a. **Faktor internal**, faktor ini tentunya sangat menitikberatkan pada situasi dan perkembangan yang sedang terjadi di suatu wilayah negara yang tentunya hanya melibatkan pihak-pihak yang mendiami wilayah negara tersebut. Faktor internal tentunya melibatkan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut dan pemerintah yang berwenang di negara tersebut. Ada banyak sekali faktor-faktor internal yang dapat menjadi pemicu bagi setiap aktor dalam merumuskan berbagai kebijakan penting yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan domestik yang sedang terjadi.

Contohnya adalah instabilitas politik domestik akibat adanya upaya kudeta, perang saudara, dan kejahatan kemanusiaan, contoh lainnya adalah ketika suatu negara dihadapkan pada situasi krisis yang sangat mengancam stabilitas domestik di negara tersebut seperti krisis kesehatan, krisis akibat bencana alam, krisis pangan, dan masih banyak keadaan krisis yang dapat melatar belakangi setiap aktor untuk dapat merumuskan berbagai kebijakan yang penting dan strategis bagi terciptanya keadaan domestik yang lebih terkendali (Richard C. Snyder, 2002, hal 87).

b. **Faktor struktur sosial dan perilaku masyarakat**, dalam indikator yang dikemukakan oleh Snyder pada aspek struktur sosial dan perilaku masyarakat membahas mengenai berbagai kondisi yang terjadi dikehidupan yang dialami oleh masyarakat sosial yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan (Richard C. Snyder, 2002). Faktor struktur sosial dan perilaku masyarakat secara langsung juga ikut mempengaruhi faktor internal. Secara garis besar, faktor internal dan faktor struktur sosial masyarakat adalah indikator yang saling berhubungan dalam proses pembuatan kebijakan.

c. **Faktor proses pembuatan kebijakan**, faktor ini menjadi penghubung antara faktor internal dan faktor eksternal. Setiap aktor perlu menyikapi berbagai faktor yang menjadi dasar dalam merumuskan suatu kebijakan. Pada proses pembuatan kebijakan memerlukan kecermatan dan ketepatan seorang aktor dalam memutuskan dan menentukan suatu kebijakan yang bersifat strategis bagi keberlangsungan negara. Snyder menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh aktor hubungan

internasional memerlukan peran serta dari berbagai instrumen pendukung lainnya agar kebijakan yang dirumuskan dapat sejalan dan mampu diserap oleh berbagai sektor (Richard C. Snyder, 2002). Hubungan yang baik antara aktor dan instrumen pendukung merupakan hal mutlak yang wajib untuk selalu dikedepankan.

d. **Faktor tindakan (*action*)**, dalam proses pembuatan kebijakan, tindakan seorang aktor adalah hal yang sangat diperhatikan oleh berbagai pihak. Suatu kebijakan dan keputusan yang diambil oleh aktor hubungan internasional tercermin melalui tindakan yang diambilnya. Snyder berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang diputuskan berdasarkan beberapa aspek dan faktor dalam proses pembuatan kebijakan (Richard C. Snyder, 2002). Pada faktor ini juga menjadi suatu jembatan pengubung selain proses pembuatan kebijakan di atas. Kecermatan dalam melihat situasi internal dan eksternal adalah hal yang utama untuk terus diupayakan oleh decision making agar tujuan yang diinginkan dapat sejalan dengan visi yang telah disusun.

e. **Faktor eksternal**, faktor ini tentunya membahas mengenai adanya peran dan dampak yang ditimbulkan dari luar wilayah negara atau yang dapat dikatakan faktor yang melibatkan negara lain dalam tatanan global (Richard C. Snyder, 2002). Faktor eksternal tentunya menghubungkan suatu negara terhadap negara lain dalam sistem dan tatanan internasional, termasuk juga di dalamnya dapat melibatkan pihak organisasi internasional. Ada berbagai persoalan eksternal yang dapat menjadikan

pemicu bagi setiap aktor dalam merumuskan kebijakan untuk menghadapi persoalan-persoalan penting tersebut.

Dari kelima faktor utama dalam teori pembuatan kebijakan yang dikemukakan oleh Snyder tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam menentukan dan merumuskan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh setiap aktor dalam hubungan internasional tersebut harus memperhatikan keadaan dan kondisi terkini yang dapat dijadikan sebagai latar belakang bagi setiap aktor untuk membuat kebijakan.

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai bagaimana teori pembuatan kebijakan (*decision making*) tersebut dapat berjalan dengan baik, mari kita melihat beberapa data yang telah dihimpun dari beberapa sumber mengenai kondisi terkini yang sedang dihadapi oleh Malawi. Selanjutnya peneliti memberikan sejumlah data mengenai bidang kesehatan dan ketahanan pangan di Malawi sebagaimana yang menjadi fokus utama dalam penelitian kali ini. Pemerintah Malawi tidak memiliki sumber daya yang besar untuk mendonasikan sepenuhnya anggaran belanja terhadap persoalan-persoalan kesehatan di Malawi terutama mengenai kasus besar seperti kematian bayi, HIV/AIDS, *Tuberculosis*, dan Malaria, sehingga untuk kasus-kasus tersebut merupakan penyumbang angka kematian tertinggi bagi Malawi, juga bagi Afrika dan dunia. Rilis data dari WHO, Malawi menempati urutan ke 195 dari total 201 negara di dunia terkait sistem pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan yang memadai bagi penduduknya. Pada tahun 2017, sekitar 89% perawat kesehatan di Malawi praktis hanya mengandalkan bantuan dan donor kemanusiaan. Data lainnya adalah, WHO melaporkan bahwa negara ini hanya

terdapat sekitar 0.2% dokter per 10.000 penduduk dan 3,4% perawat serta bidan per 10.000 penduduk, sehingga menempatkan Malawi sebagai negara dengan kekurangan tenaga kesehatan paling parah di Afrika (World Health Organization n.d.).

Pada sektor ketahanan pangan, Malawi adalah negara yang sangat rentan terhadap kasus krisis pangan di Afrika, dikarenakan terhitung sejak tahun 2002 hingga 2017 Malawi dilanda krisis pangan berkepanjangan sehingga pemerintah dengan tegas menyatakan bencana nasional bagi Malawi. Penyebabnya adalah bencana kekeringan yang panjang melanda Malawi hampir sepanjang tahun dan bencana banjir bandang yang merusak seluruh lahan pertanian akibat curah hujan yang terjadi sepanjang tahun secara sporadis. Hal tersebut membuat Malawi mengalami krisis pangan dan kelaparan yang serius. Alasan lainnya adalah kondisi lahan pertanian di Malawi dinilai kurang produktif sehingga memerlukan bantuan pupuk untuk menyuburkan tanah yang tidak produktif tersebut, namun ternyata petani setempat sangat kesulitan dalam mengakses pupuk dikarenakan pendapatan mereka yang sangat tidak stabil. Dengan demikian sangat diperlukan berbagai kebijakan pemerintah yang strategis dalam menjawab berbagai kondisi dan keadaan yang cukup memprihatinkan tersebut agar dapat berada dalam koridor untuk menyongsong visi pembangunan berkelanjutan yang telah digagas oleh negara-negara di dunia. Pemerintah Malawi sebagai otoritas tertinggi di negara tersebut sangat diperlukan dalam menentukan langkah dan kebijakan yang tepat untuk dapat menjamin hajat hidup orang banyak dan menopang kesejahteraan masyarakat Malawi.

Dalam melihat situasi yang terjadi di Malawi tersebut, tentunya dapat kita kategorikan bahwa persoalan internal yang menjadi fokus utama sehingga menyebabkan situasi di Malawi menjadi tidak stabil. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan bagi seluruh masyarakat Malawi merupakan aktor utama dan yang paling penting untuk dapat merumuskan kebijakan yang strategis bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Malawi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Snyder dalam teori *decision making*, bahwa negara merupakan aktor hubungan internasional yang bertugas sebagai pembuat keputusan resmi berdasarkan tindakan yang bersifat otoratifnya untuk mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (Richard C. Snyder, 2002, hal 4).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, yang biasanya dikenal dengan istilah penelitian yang tidak menggunakan basis data berupa angka-angka dan variabel. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang mengumpulkan data-data berdasarkan berbagai persoalan dan permasalahan yang terjadi dengan mengamati persoalan sosial disekitar kita (Rahmat, 2009, hal 2).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah negara (pemerintah), yang dalam hal ini adalah Republik Malawi. Objek penelitian kali adalah

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Malawi, sehingga dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai kebijakan pemerintah Republik Malawi dalam menyelesaikan persoalan krisis pangan yang berdampak pada keamanan kesehatan Malawi pada tahun 2017.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan menggunakan data yang diperoleh pihak lain atau bisa juga menggunakan data berdasarkan beberapa catatan maupun dokumen (Pertiwi, 2017, hal 212). Data yang diperoleh pada penelitian ini diperoleh penulis dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, website resmi pemerintah, *e-book*, dan internet. Data-data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan lalu diolah untuk dapat dipahami penulis agar mampu menjawab penelitian yang dilakukan.

1.8.4 Proses Pengumpulan Data

Sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu penulis melakukan riset dan pengumpulan beberapa sumber, baik menggunakan sumber internet maupun sumber jurnal-jurnal. Setelah menemukan topik yang ingin dibahas, penulis mengumpulkan berbagai referensi dan literatur yang diperoleh dari buku, jurnal, dan yang paling penting adalah sumber-sumber dari media, baik media cetak maupun media *online* yang mengabarkan persoalan yang tengah dihadapi berkaitan dengan topik

yang ingin dibahas oleh penulis. Sumber dari media berita tersebut sangat diperlukan oleh penulis untuk dapat mengetahui persoalan-persoalan aktual yang sedang berlangsung atau yang telah terjadi agar dapat dimasukkan ke dalam tulisan ini.

BAB 2
BENCANA KEKERINGAN DAN KRISIS PANGAN MALAWI

Dalam bab ini, akan menjelaskan mengenai bencana kekeringan yang melanda Malawi sejak tahun 2015 hingga pada tahun 2017 dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana kekeringan tersebut hingga menyebabkan krisis pangan yang melanda Malawi. Penulis membagi pembahasan menjadi dua subbab. Subbab pertama membahas mengenai bencana kekeringan di Malawi dan pada subbab kedua membahas mengenai krisis pangan yang terjadi di Malawi. Kemudian, pada subbab kedua dibagi lagi menjadi dua pembahasan. Bagian pertama membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh krisis pangan tersebut dan pada bagian kedua membahas mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam menghadapi krisis pangan tersebut.

2.1 Bencana Kekeringan di Malawi Tahun 2015-2017

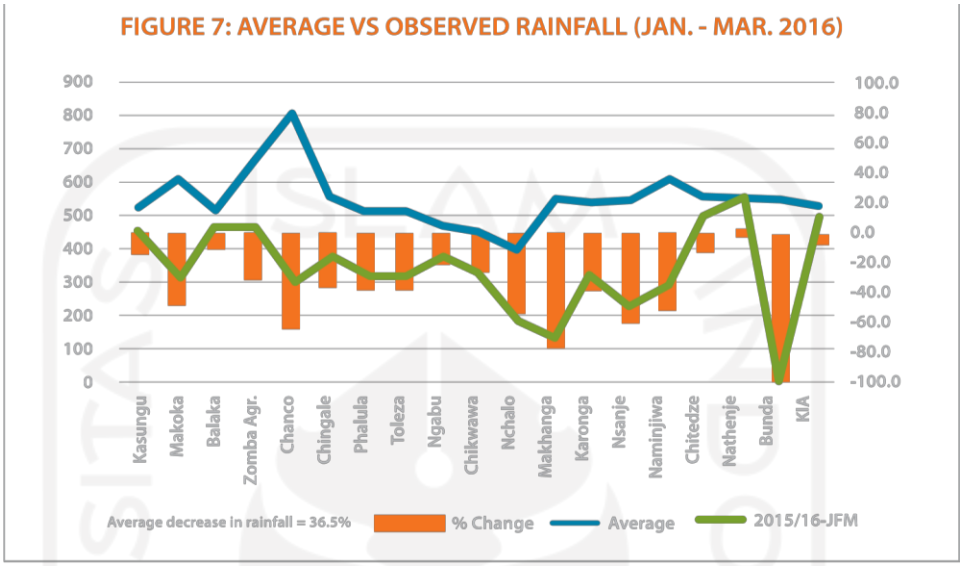
Sejak tahun 2015, pemerintah Malawi dihadapkan pada situasi sulit yang terjadi hingga ke seluruh penjuru negeri. Kekeringan yang melanda negara *landlock* ini tidak seperi biasanya hingga terjadi dalam kurun waktu yang lama jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Malawi tidak seberuntung negara Afrika lainnya, meskipun memiliki sebuah danau yang hampir meliputi seluruh wilayah negara, namun pada kenyataannya keuntungan tersebut justru tidak mampu membuat Malawi merasakan dampak yang signifikan. Keberadaan Danau Malawi tidak begitu mampu mendukung ketersediaan air untuk saluran irigasi masyarakat dalam menopang jalannya aktivitas *agriculture*.

Kondisi tersebut juga semakin diperparah dengan dihadapkannya pada situasi fenomena El Nino yang terjadi disepanjang tahun kian membuat Malawi terdampak bencana kekeringan (Aljazeera, 2016). El Nino merupakan sebuah fenomena perubahan cuaca yang perubahannya cukup signifikan. Kenaikan suhu permukaan air laut diwilayah Pasifik yang menjadi tanda dan sebab fenomena ini terjadi. Meskipun sebaran fenomena ini biasanya berada di wilayah Pasifik, namun dampak yang ditimbulkan justru hingga ke berbagai belahan dunia (Irawan, 2006). Jika suatu negara mengalami dan terdampak fenomena El Nino, maka bukan tidak mungkin suatu bencana dapat melanda wilayah tersebut. Pada umumnya bencana tersebut menyebabkan sejumlah kekeringan yang masif hingga hampir meliputi seluruh wilayah negara (Irawan, 2006, hal 32). Persoalan ini begitu terasa kompleks ketika curah hujan tahunan di suatu negara juga mengalami sejumlah persoalan. Curah hujan rata-rata Malawi dapat berlangsung selama 5-7 bulan sepanjang tahunnya (Spark, 2021). Namun, sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 curah hujan tahunan di Malawi mengalami penurunan yang signifikan. Tercatat bahwa dalam kurun waktu satu tahun, Malawi hanya diguyur hujan 1 bulan saja meskipun intensitasnya cukup tinggi (Aljazeera, 2016).

Pada penghujung Oktober hingga pertengahan 2016, curah hujan di Malawi mengalami situasi kritis. Hal ini diakibatkan terjadinya penurunan curah hujan hingga berada pada angka 32,8 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata curah hujan tahunan sebelumnya. Situasi ini

terjadi di beberapa provinsi besar antara lain Blantyre, Chikwawa, Nsanje, Bunda, dan Chanco.

Gambar 1. Data Penurunan Curah Hujan pada Provinsi di Malawi Tahun 2016



Sumber: (World Bank Group, United Nations, and European Union, 2016).

Secara kondisi dan letak geografis, Malawi bukanlah negara yang cukup beruntung jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Afrika. Meskipun memiliki sebuah danau yang luasnya hampir meliputi seluruh bagian negara, kondisi ini tidak cukup mampu mengimbangi situasi kekeringan akibat fenomena El Nino yang melanda Malawi sejak tahun 2015 hingga tahun 2016. Praktis, Malawi cenderung mengandalkan potensi turun hujan untuk dapat menopang ketersediaan cakupan air bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas *agriculture*. Namun, harapan tersebut juga seolah sirna ketika Malawi juga dihadapkan pada penurunan intensitas curah hujan tahunan yang melanda seluruh wilayah negara *landlock* tersebut (World Bank Group, United Nations, and European Union, 2016).

2.2 Krisis Pangan Malawi

Sebagai negara tropis, masyarakat tentu sangat membutuhkan peranan alam yang mendukung untuk dapat membantu mereka dalam beraktivitas pada sektor *agriculture*. Sebagian besar penduduk Malawi adalah bermata pencaharian sebagai petani jagung dan gandum. Akan tetapi, jagung merupakan sumber pangan populer di Malawi, sehingga hampir seluruh mayoritas penduduk mengonsumsi jagung sebagai sumber pangan harian. Sejak bencana kekeringan melanda, seluruh lahan pertanian jagung milik masyarakat menjadi terdampak hingga menyebabkan gagal panen. Mayoritas penduduk mengalami kelaparan akibat tidak tersedianya bahan pangan yang layak di pasaran untuk dapat dikonsumsi (Festus O. Amadu, 2021). Para petani mengalami kerugian besar akibat hasil pertanian mereka tidak dapat dipanen secara optimal bahkan hingga tidak layak untuk dipanen (World Bank Group, United Nations, and European Union, 2016).

2.2.1 Dampak Krisis Pangan bagi Masyarakat

Ketersediaan pangan yang layak merupakan kewajiban negara yang harus selalu dapat tersedia dan terpenuhi untuk seluruh masyarakatnya. Suatu negara dapat dikatakan lalai dan abai terhadap pemenuhan hak asasi jika ketersediaan dan akses pangan tidak dapat dijangkau oleh masyarakatnya (Benjamin T. Wood, 2017). Negara yang berdaulat bukan hanya negara yang memiliki wilayah, penduduk, maupun pemerintahan, namun juga negara yang berdaulat harus terus mengoptimalkan ketersediaan pangan yang layak dan aksesnya terpenuhi.

World Food Programme (WFP) mencatat setidaknya 2,8 juta penduduk Malawi terdampak kelaparan. Rilis data WFP juga menyatakan bahwa bencana kelaparan tersebut lebih parah jika dibandingkan pada satu dekade sebelumnya (News, 2016). Namun, pemerintah Malawi dalam rilisnya menyebutkan bahwa sekitar 6,5 juta penduduk Malawi akan dihadapkan pada situasi rentan kelaparan (World Bank Group, United Nations, and European Union, 2016). Artinya, bayang-bayang situasi krisis pangan akan terus menghantui masyarakat dan pemerintah Malawi jika situasi tersebut belum mampu diatasi secara optimal.

Grafik 1. Angka Distribusi Kebutuhan Pangan Berdasarkan Wilayah

DISTRIBUTION OF FOOD SECURITY NEEDS BY REGION				
	Cost (USD)			
	Southern Districts	Central Districts	Northern Districts	TOTAL
Importation of 375,000 mt Maize equivalent for the Vulnerable Population	101,562,500	70,312,500	15,625,000	187,500,000
Additional Food Supply need-ed for non-human ita-rian consumption (150,000 mt)	40,625,000	28,125,000	6,250,000	75,000,000
Rehabilitate Storage Warehouse	154,762	107,143	23,810	285,714
Rehabilitation of 15 meta-llic maize storage silos	2,155,299	1,492,130	331,585	3,979,014
Promotion of food diversify-cation in the country through the implementation of various communication strategies	851,190	589,286	130,952	1,571,429
Improving food security early warning systems	66,548	46,071	10,238	122,857
Total Needs	**145,415,299**	**100,672,130**	**22,371,585**	**268,459,014**

Sumber: (World Bank Group, United Nations, and European Union, 2016)

Berdasarkan tabel di atas, pemerintah Malawi setidaknya perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk dapat memastikan ketersediaan bahan pangan di seluruh wilayah negara. Jika dilihat dari kebutuhan anggaran dalam memulihkan krisis pangan tersebut, setidaknya pemerintah Malawi

harus mengeluarkan anggaran sebesar 228 juta USD. Hal ini tentu semakin membuat Malawi kian terpuruk dalam upayanya untuk mengatasi krisis pangan tersebut.

Dampak lainnya yang ditimbulkan oleh persoalan krisis pangan tersebut adalah pada sektor kesehatan. Berdasarkan data WHO, Malawi merupakan negara dengan rata-rata kasus malnutrisi yang cukup tinggi di dunia. Tercatat saat ini Malawi menduduki peringat ke 21 dunia pada aspek gangguan malnutrisi. Bencana kekeringan yang menyebabkan terjadinya krisis pangan berkepanjangan melanda Malawi pada kurun tahun 2015 hingga tahun 2017, telah membuat angka kasus malnutrisi semakin meningkat (World Bank Group, United Nations, and European Union, 2016). Kekurangan bahan pangan yang signifikan akibat bencana kekeringan tersebut telah membuat peningkatan risiko gizi buruk pada setiap anak berusia 12 tahun ke bawah.

Kemudian, terdapat beberapa kasus gangguan kesehatan lainnya yang tercatat oleh WHO sebagai yang tertinggi akibat krisis pangan berkepanjangan tersebut, antara lain:

1. Malaria (23,1%)
2. Infeksi kulit (39,9%)
3. Gangguan pernapasan akut (ISPA) (19,9%), dan
4. Diare (18,2%)

Khusus untuk gangguan nutrisi (*malnutrition*), kondisi krisis pangan telah membuat peningkatan kasus malnutrisi yang sangat kronis jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada setiap wilayah distrik yang paling parah terdampak krisis pangan, maka tidak heran jika kasus malnutrisi

juga semakin tinggi. Daerah rentan seperti ini dinilai sangat berisiko tinggi terhadap gangguan gizi buruk yang tidak hanya dialami oleh balita saja, namun juga dirasakan oleh remaja terutama dengan penyakit penyerta seperti HIV dan TBC (World Bank Group, United Nations, and European Union, 2016).

Pada situasi yang kompleks tersebut, pihak yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak dan perempuan. Mayoritas anak-anak mengalami gizi buruk dan perempuan mengalami persoalan kesehatan yang cukup memprihatinkan (Jhon B. Mason, 2007). Malnutrisi tidak hanya membuat anak-anak menjadi gangguan kesehatan, namun juga terjadi gangguan mental yang cukup parah sehingga membuat balita di Malawi juga mengalami peningkatan angka kematian yang cukup tinggi yaitu sebesar 50,05% ditahun 2016. Kemudian, angka kematian bayi per 1000 kelahiran juga mengalami peningkatan kasus sebesar 35,28% (World Health Organization, 2016). Kasus-kasus tersebut kian membuat Malawi semakin terpuruk bahkan ke titik yang paling rendah selama negara ini berdiri.

Pada aspek pendidikan contohnya, ternyata cukup menjadi terdampak akibat krisis pangan tersebut. Tingginya angka kasus gizi buruk di negara ini mengakibatkan penurunan performa dan minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Anak-anak tersebut dihadapkan pada situasi psikososial akibat kekurangan asupan nutrisi dan air bersih layak konsumsi (World Bank Group, United Nations, and European Union, 2016). Bahkan, banyak diantara mereka yang mengalami penurunan daya serap terhadap pembelajaran yang berlangsung dibeberapa sekolah. Bagi anak-anak

dalam fase pertumbuhan, makanan, air dan nutrisi yang baik adalah sumber utama yang harus dapat tetap terpenuhi agar kemampuan psikomotorik mereka dapat tetap terjaga dengan baik.

Sekolah tidak lagi mampu menyediakan kebutuhan makanan bagi siswanya akibat sumber pangan yang sulit hingga mengalami kelangkaan (World Bank Group, United Nations, and European Union, 2016). Ketika sumber pangan dapat terpenuhi dan terjaga dengan baik, tentu hal ini berdampak pada aspek lainnya. Ketersediaan pangan adalah hal yang krusial dalam menopang aktivitas lainnya pada tatanan sebuah negara. Salah satu aspek kesejahteraan sebuah negara dapat ditentukan dengan jaminan ketersediaan sumber pangan yang baik dan layak konsumsi bagi masyarakatnya.

Ketika pangan dapat terpenuhi dengan baik bagi seluruh masyarakat, tentu aspek keamanan kesehatan juga mengalami sejumlah dampak yang luar biasa besar. Hubungan antara pangan yang layak konsumsi dan keamanan kesehatan selalu berdampingan. Apabila manusia mampu memperoleh keamanan kesehatan, maka juga ikut berdampak pada aspek lainnya seperti, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya.

2.2.2 Upaya Negara dalam Menghadapi Krisis Pangan

Pada situasi krisis pangan akibat bencana kekeringan yang melanda Malawi tersebut, tentunya negara harus hadir pada situasi tersebut. Dalam hal ini adalah pemerintah dan pihak-pihak pemangku kepentingan menjadi motor penggerak agar situasi krisis ini dapat diselesaikan dengan baik. Masyarakat

sangat menggantungkan harapan serta keinginan mereka pada negara melalui pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan tersebut. Pemerintah harus terus hadir dan mengupayakan semua potensi yang dimilikinya, agar situasi krisis ini dapat dikendalikan dengan baik. Seluruh pihak pemangku kepentingan diharapkan dapat saling bersinergi dalam mengupayakan yang terbaik untuk mengatasi situasi ini dengan baik.

Pemerintah Malawi beberapa saat setelah menetapkan situasi darurat pangan dan krisis pangan nasional, telah mengupayakan beberapa kemungkinan untuk dapat segera mengatasi situasi tersebut dengan cepat. Status bencana nasional telah ditetapkan oleh pemerintah dengan mengharapkan bantuan pihak-pihak kemanusian dunia untuk dapat bersama-sama dalam menghadapi situasi krisis tersebut (Madani, 2016). Melalui usahanya, terdapat beberapa upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah Malawi dalam menghadapi situasi krisis tersebut, antara lain:

1. Departemen Penanggulangan Bencana Nasional telah membuka akses bagi bantuan kemanusiaan internasional, baik melalui IGO's maupun NGO's. Pihak swasta maupun perorangan diharapkan mampu memberikan bantuan kemanusiaan dalam usaha meringankan situasi krisis tersebut secara optimal. Akibat keterbatasan yang dimiliki oleh Malawi, pemerintah sangat membutuhkan peranan dari bantuan internasional dalam menyelesaikan situasi krisis tersebut agar dapat terkendali lebih cepat (Hamel, 2019).
2. Kementerian Keuangan telah membuka layanan bantuan dari pihak-pihak internasional untuk menyelesaikan situasi tanggap darurat tersebut.

Secara terbuka, pemerintah telah memberikan data valid terhadap jumlah bantuan keuangan yang mampu diakomodasi oleh Kementerian Keuangan yaitu sebesar 149,3 juta USD. Bantuan tersebut telah diakomodasi untuk kemudian diberikan kepada pemerintah provinsi dan distrik yang terdampak situasi krisis tersebut.

3. Pemerintah melalui Departemen Penanggulangan Bencana Nasional telah menjalin kerjasama dengan berbagai instrumen organisasi internasional seperti FAO, WHO, WFP, UNHCR, dan UNICEF untuk dapat memetakan wilayah yang terdampak krisis. Tujuan pemetaan ini diharapkan mampu memberikan jaminan penyelamatan jiwa melalui berbagai bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat (World Bank Group, United Nations, and European Union, 2016).
4. Palang Merah Malawi (MRCS) telah menjalin kerjasama dengan Palang Merah Internasional untuk mengupayakan program bantuan kemanusiaan darurat dalam mengatasi situasi tanggap darurat kebencanaan sebesar 3,7 juta USD.
5. Pemerintah Malawi berhasil membawa situasi krisis dan bencana nasional tersebut ke dalam lingkup hubungan regional dikawasan Selatan Afrika. *South Africa Development Community* (SADC) telah menetapkan bantuan kemanusian untuk Malawi berupa jaminan aksi kemanusian di bawah SADC akan diberlakukan selama 36 bulan secara penuh. Melalui hasil pemetaan wilayah krisis yang berhasil dirumuskan oleh pihak-pihak terkait sebelumnya, SADC menjamin akan

memberikan kemudahan terhadap upaya distribusi bantuan pangan dari wilayah SADC lainnya (World Bank Group, United Nations, and European Union 2016). SADC juga bersedia untuk memberikan bantuan kemanusiaan non-pangan kepada Malawi hingga batas waktu tertentu. Kemudian, SADC bersedia untuk terjun ke wilayah terdampak krisis dengan membawa misi khusus seperti, aksi kemanusiaan, aksi ketahanan, dan bantuan intervensi makroekonomi.

6. Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama WFP berhasil memutuskan untuk memberikan akses terhadap bantuan pangan untuk menjaga stabilitas pangan di masa tanggap darurat (Philipose, 2018). Bantuan tersebut meliputi pendanaan sebesar 268 juta USD, 375.000 metrik ton jagung untuk kebutuhan kemanusiaan, dan 150.000 metrik ton jagung untuk kebutuhan non-kemanusiaan. Kemudian, WFP dan Kementerian Pertanian Malawi secara bersama-sama melibatkan peranan petani untuk dapat kembali memproduksi jagung sebagai cadangan pangan dengan mengoptimalkan fasilitas irigasi yang ada (Holden & Fisher, 2015).
7. Kementerian Kesehatan bersama pihak-pihak terkait lainnya telah mengupayakan dalam menyediakan dan melaksanakan layanan kesehatan diseluruh wilayah terdampak krisis. Tim yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan segera memastikan kesiapsiagaan yang optimal dan berkelanjutan di seluruh wilayah terdampak, mengupayakan program pemenuhan kesehatan bagi masyarakat, dan menjamin dibentuknya layanan kesehatan bagi setiap distrik terdampak dengan

memastikan ketersediaan tenaga ahli kesehatan yang optimal. Melalui layanan *One Stop Care*, diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat terdampak dalam mengakses fasilitas kesehatan yang layak.

8. Departemen Gizi dan HIV-AIDS Kementerian Kesehatan bersama UNICEF segera melaksanakan program tanggap darurat berupa pemetaan wilayah terdampak, pemantauan secara berkelanjutan, dan menjamin terpenuhinya gizi nasional dalam menghadapi situasi darurat tersebut. Pihak-pihak tersebut berupaya secara optimal untuk dapat mengintervensi kebutuhan gizi bagi masyarakat di wilayah terdampak krisis. Program ini terutama diperuntukkan bagi bayi, balita, dan ibu menyusui karena ketiga kategori tersebut merupakan pihak yang paling rentan terdampak situasi krisis pangan hingga menyebabkan beberapa gangguan kesehatan.
9. Kementerian Pendidikan, SAINS dan Teknologi bersama Departemen Gizi dan HIV-AIDS Kementerian Kesehatan berkolaborasi secara maksimal untuk memastikan program pembelajaran di seluruh sekolah pada wilayah terdampak dapat berjalan secara optimal. Mereka berupaya untuk mengintervensi sekolah melalui program pemenuhan kebutuhan pangan siswa yang layak untuk menopang jalannya kegiatan pembelajaran yang optimal.
10. Pemerintah mendorong Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk segera melakukan upaya strategis dalam menjamin ketersediaan pangan nasional melalui program impor komoditas pangan dan

pendistribusian yang efektif kepada masyarakat terdampak. Program tersebut juga berfokus pada upaya intervensi pemerintah dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk dapat merubah pola konsumsi pangan agar dalam keadaan tanggap darurat bencana, masyarakat dapat terus terjaga kebutuhan pangan dan nutrisinya (Erwin Knippenberg, 2017).

11. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian & Ketahanan Pangan mengkampanyekan program pemulihan gizi nasional untuk menjaga ketahanan pangan di masyarakat serta siap sedia dalam kondisi darurat dengan memberikan pendekatan EWSs (*Early Warning Systems*).

Selain beberapa upaya di atas, pemerintah Malawi juga aktif untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan bencana dan terus mendorong upaya mitigasi penanggulangan yang lebih komprehensif. Beberapa upaya tersebut kemudian dituangkan kedalam sebuah dokumen yang disebut dengan DRR (*Disaster Risk Reduction*) antara lain:

1. Mengkolaborasikan pemulihan tanggap darurat kebencanaan yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan global serta upaya intervensi pemerintah yang lebih humanis.
2. Pemerintah bersama pihak-pihak yang terlibat dalam upaya tersebut mendorong peran serta masyarakat dalam proses pemulihan agar keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah dapat sejalan dengan realita yang dialami masyarakat dan terus aktif memberdayakan masyarakat terdampak dengan pendekatan yang lebih inklusif.

3. Dalam menanggulangi bencana tersebut, pemerintah memfokuskan upayanya pada kelompok rentan dan kelompok yang mengalami dampak terparah akibat bencana kekeringan tersebut seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, penyintas HIV-AIDS, dan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor *agriculture*.
4. Aktif dalam memberikan edukasi dan pendekatan secara personal kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut.
5. Mempercepat pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak melalui program pemulihan ekonomi dan pemetaan wilayah pertanian terdampak serta memberikan upaya keterampilan baru bagi masyarakat apabila situasi tersebut belum mampu dikendalikan dengan cepat.
6. Pemerintah mendorong upaya dalam meningkatkan kapasitas nasional bagi instansi terkait dalam menghadapi situasi kesiagaan bencana serta proses pemulihan yang cepat bagi masyarakat.

Hubungan yang bersifat sinergi antar lembaga negara juga wajib dikedepankan dalam situasi krisis dan darurat. Oleh karena itu, seluruh kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh beberapa kementerian dan departemen terkait kemudian ikut direspon oleh parlemen (legislatif), mereka menyatakan diri dengan sikap yang tegas untuk terus mendukung dan mengawal seluruh langkah maupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (Kita, 2017). Seluruh anggota diparlemen mengungkapkan bahwa semua kebijakan yang bertujuan dalam mengedepankan kepentingan

masyarakat Malawi akan selalu didukung oleh parlemen. Sebagaimana negara dengan sistem demokrasi, maka tentunya diperlukan check and balances dalam seluruh kebijakan yang dilakukan antar lembaga negara. Dalam situasi krisis dan darurat perlu untuk mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan apapun, maka dari itu seluruh institusi dalam negeri bersama-sama dan saling mendukung terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya menyelesaikan persoalan krisis pangan tersebut agar dapat kembali pulih dengan cepat.

Berdasarkan penjelasan mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Malawi dalam menghadapi situasi dan krisis tanggap bencana nasional tersebut setidaknya telah membuat situasi di masyarakat cukup dapat dikendalikan. Meskipun demikian, perlu adanya upaya yang dituangkan ke dalam berbagai kebijakan strategis lainnya untuk dapat terus membuat situasi dan kondisi di masyarakat dapat tetap terkendali dengan baik. Jika hal ini tidak dilakukan secara optimal dan efektif, tentu situasi dan kondisi di masyarakat kembali tidak menentu hingga membuat banyaknya kehidupan yang terganggu akibat situasi krisis tersebut.

Pemerintah adalah ujung tombak dalam semua persoalan di suatu negara. Kehadiran pemerintah dalam seluruh persoalan yang menimpa masyarakatnya sangat membantu terpenuhinya suatu kesejahteraan di masyarakat. Pada situasi krisis tersebut, diperlukan sinergitas yang baik antara pemerintah dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya, baik secara swasta maupun perorangan demi terkendalinya stabilitas kehidupan masyarakat.

BAB 3
KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAWI DALAM MENGHADAPI KRISIS PANGAN

Berdasarkan teori pembuatan kebijakan (*decision making*) yang dikemukakan oleh Richard Snyder, dijelaskan bahwa dalam perumusan suatu kebijakan yang bersifat penting dan strategis harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu faktor internal, struktur sosial di masyarakat, proses pengambilan kebijakan (*decision making process*), tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah (*action*), dan faktor eksternal (Richard C. Snyder, 2002). Kelima indikator tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan dalam upaya pembuatan kebijakan oleh aktor hubungan internasional. Setiap aktor hubungan internasional diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat merumuskan berbagai kebijakan yang penting dan strategis dalam tatanan global.

Dalam penelitian kali ini, pemerintah Malawi merupakan aktor hubungan internasional yang bertugas untuk membuat berbagai kebijakan terkait krisis pangan yang melanda Malawi sejak tahun 2015 tersebut. Persoalan mengenai krisis pangan sejatinya merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah untuk dapat segera mengatasinya dengan merumuskan berbagai kebijakan yang strategis demi kepentingan masyarakat di dalamnya. Pemerintah adalah otoritas yang bertanggungjawab penuh dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakatnya demi terciptanya sebuah tatanan yang baik pada suatu negara.

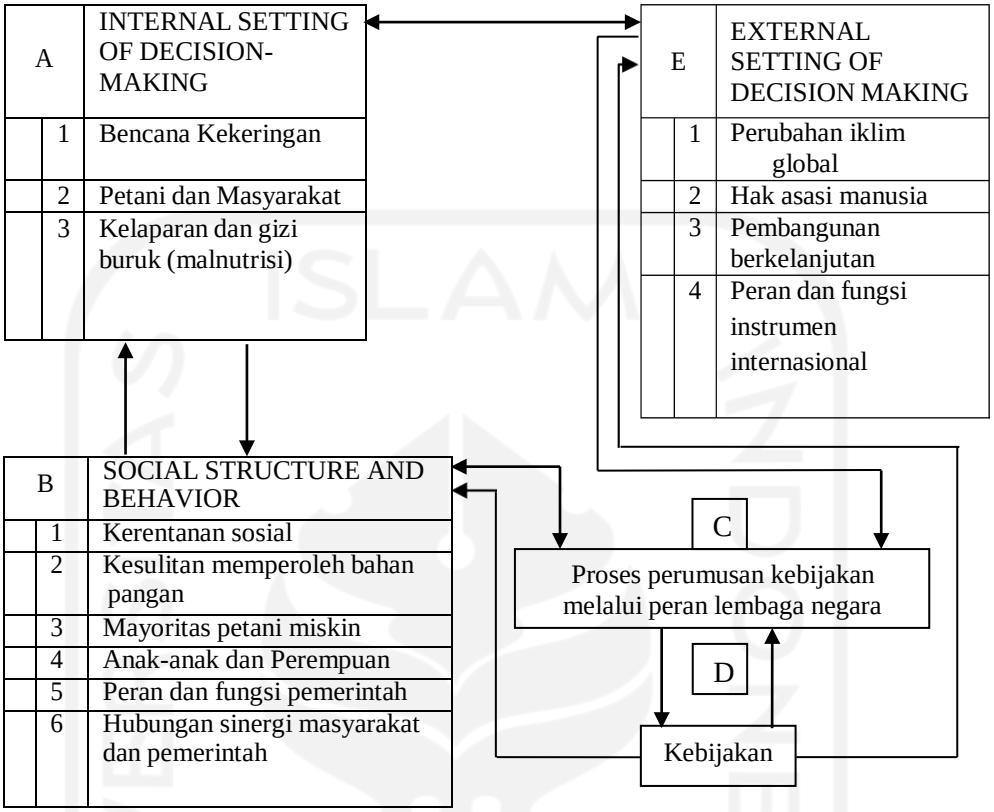
Krisis pangan setidaknya telah membuat berbagai aktivitas dari berbagai sektor kehidupan masyarakat menjadi terhambat. Pentingnya terhadap kebutuhan pangan merupakan hal yang harus terus dikedepankan oleh negara sebagai pemangku kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya situasi krisis pangan tersebut, pemerintah diharuskan mampu memberikan sebuah dampak yang positif melalui kebijakan-kebijakan yang penting dalam upaya menanggulangi krisis tersebut. Apabila melihat konsep yang dikemukakan oleh Snyder tersebut, maka pemerintah harus mengoptimalkan sejumlah sumber daya yang dimilikinya untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan krisis pangan tersebut (Richard C. Snyder, 2002).

Dalam bab ini akan menjelaskan berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Malawi dalam menyelesaikan persoalan krisis pangan tersebut. Perumusan kebijakan yang dilakukan tentu harus memuat 5 indikator penting dalam proses pembuatan kebijakan seperti halnya yang dikemukakan oleh Snyder dalam bukunya tersebut. Kelima indikator tersebut akan dikupas satu per satu dalam beberapa sub bab berikut.

Pada subbab pertama, akan dijelaskan mengenai aplikasi teori *decision making* dan pada subbab kedua akan dijelaskan mengenai analisis konteks studi kasus krisis pangan Malawi berdasarkan faktor-faktor pembuatan kebijakan yang telah dikemukakan oleh Snyder.

3.1 Aplikasi Teori

Diagram 2. Aplikasi Teori *Decision Making Model*



Sumber: (Richard C. Snyder, 2002)

Tabel 1. Aplikasi Teori

No	Variabel Teori	Analisis/Aplikasi
A	**Faktor internal (*Internal Setting of Decision-Making*)**	a. ***Non-human environment:*** Bencana kekeringan akibat fenomena iklim telah membuat kondisi lahan pertanian masyarakat terganggu hingga menyebabkan kondisi gagal panen dan krisis pangan. b. ***Society:*** Mayoritas petani menjadi terdampak dengan adanya kondisi tersebut. c. ***Human Environment (Culture, Population):*** Banyak penduduk Malawi yang menjadi korban akibat krisis pangan tersebut yang menghambat jalannya berbagai aktivitas masyarakat.

No	Variabel Teori	Analisis/Aplikasi
B	**Struktur sosial dan perilaku masyarakat (*Social Structure and Behavior*)**	a. ***Major Common Value Orientations:*** Terjadinya kerentanan sosial yang memperihatinkan akibat krisis pangan berkepanjangan. b. ***Major Institutional Patterns:*** Mayoritas masyarakat kesulitan memperoleh bahan pangan dalam mencukupi kebutuhan pangan harian. c. ***Major Characteristics of Social Organizations:*** Hampir sebagian besar penduduk Malawi merupakan kelompok masyarakat bermata pencaharian sebagai petani miskin. d. ***Role Differentiation and Specialization:*** Kaum anak-anak dan perempuan menjadi kelompok sosial yang paling rentan terdampak krisis pangan. e. ***Groups: Kinds and Function:*** Masyarakat mengharapkan adanya peranan dan fungsi dari pemerintah yang segera dalam berupaya untuk mengatasi situasi tersebut. f. ***Relevant Social Processes:*** Masyarakat harus dapat terus menjaga hubungan yang sinergi bersama pemerintah agar persoalan krisis pangan dapat cepat teratasi dengan optimal.
C	**Proses pembuatan kebijakan-aktor pembuat kebijakan *(Decision-Making Process Decision-Makers)***	Proses pembuatan kebijakan oleh aktor pembuat kebijakan merupakan penghubung antar variabel lainnya. Peranan dan hubungan yang baik antar lembaga negara sangat diperlukan dalam proses perumusan kebijakan. Pembagian tugas dan kewenangan antar lembaga negara merupakan sebuah keharusan untuk menghindari terjadinya kebijakan yang tidak efektif. Kecermatan dan ketepatan harus terus diupayakan oleh aktor dalam proses perumusan kebijakan yang lebih optimal.

No	Variabel Teori	Analisis/Aplikasi
D	**Tindakan (*Actions*)**	Dalam menyikapi persoalan krisis pangan tersebut, pemerintah telah menetapkan masa tanggap darurat bencana kekeringan dan bencana krisis pangan nasional. Proses mitigasi dan penanggulangan bencana segera dengan cepat dilakukan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan semakin meluas. Melalui tindakan tersebut, pemerintah mengharapkan adanya upaya bersama dari berbagai instrumen dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
E	**Faktor eksternal *(External Setting of Decision Making)***	a. ***Non-human Environment:*** Negara berkembang saat ini sedang dihadapkan pada situasi akibat dampak perubahan iklim global yang tidak menentu hingga berakibat pada situasi kerentanan lingkungan. b. ***Other Cultures:*** Banyak negara yang saat ini sedang ramai membahas mengenai persoalan kewajiban negara dalam upaya pemenuhan nilai-nilai HAM untuk mencapai negara sejahtera (*welfare state*). c. ***Other Societies:*** Konsep SDGs sedang ramai diperbincangkan oleh berbagai pihak untuk mendorong seluruh negara dapat ikut serta mencapai tujuan tersebut. d. ***Societies organized and functioning as States, Government Action:*** Dukungan dan perananan dari berbagai instrumen internasional telah membuat pemerintah Malawi dapat lebih efektif dalam berupaya menyelesaikan persoalan tersebut.

3.2 Analisis Konteks Studi Kasus

3.2.1 Faktor Internal dalam Pengambilan Kebijakan Krisis Pangan Malawi

Faktor internal merupakan salah satu indikator penting dan utama dalam sebuah proses pembuatan kebijakan. Terlebih ketika kebijakan tersebut dirumuskan oleh pemerintah suatu negara, maka keadaan internal yang meliputi kondisi domestik suatu negara yang perlu untuk diperhatikan sebelum proses pembuatan kebijakan tersebut terlaksana. Faktor internal juga menjadi suatu pemicu bagi setiap aktor hubungan internasional dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang penting untuk keberlangsungan hidup di suatu negara yang lebih baik.

Sebagaimana yang tengah melanda Malawi beberapa tahun silam khususnya ditahun 2015-2017 merupakan tahun yang sulit untuk dihadapi oleh Malawi. Krisis pangan yang melanda negara *landlock* tersebut akibat beberapa fenomena iklim telah membuat negara ini tidak berdaya. Keadaan tersebut kemudian diperparah dengan adanya penurunan curah hujan tahunan yang drastis hingga menyebabkan beberapa lahan pertanian milik masyarakat terdampak gagal panen. Mayoritas penduduk Malawi merupakan kelompok masyarakat miskin yang setiap harinya mengkonsumsi jagung sebagai sumber bahan pangan utama. Ketika situasi krisis pangan akibat fenomena perubahan iklim dan perubahan cuaca yang semakin parah, kian membuat masyarakat Malawi terdampak beberapa gangguan kesehatan. Akibatnya, banyak anak-anak dan perempuan yang terdampak gangguan kesehatan berupa malnutrisi.

Kondisi tersebut yang kemudian menyebabkan situasi di Malawi semakin terpuruk hingga ke titik terendah.

Dalam menyikapi adanya faktor-faktor tersebut, pemerintah Malawi diharuskan untuk segera mengambil tindakan cepat dalam berupaya untuk menanggulangi persoalan tersebut. Pemerintah Malawi memfokuskan penanganan krisis pangan melalui program yang digagas oleh beberapa kementerian dan lembaga terkait. Hadirnya pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan yang penting juga sebagai upaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat pada situasi krisis. Faktor internal juga merupakan faktor yang perlu untuk dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan berbagai kebijakan, karena dengan semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentu bertujuan untuk membangun dan melindungi kondisi domestik menjadi lebih baik.

3.2.2 Struktur Sosial dan Perilaku Masyarakat Malawi

Pola kelembagaan utama masyarakat Malawi menganut sistem kelompok atau koloni. Sebagian besar penduduk Malawi mendiami daerah-daerah distrik yang dekat dengan lahan pertanian. Umumnya pada suatu kelompok biasanya memiliki lahan pertanian yang akan dikelola secara bersama-sama, yang kemudian hasil dari setiap panen komoditas pertanian akan dibagi secara merata bagi setiap kelompok (Manda, 2014). Ketika situasi krisis pangan akibat adanya bencana kekeringan tersebut melanda, mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani menjadi terdampak hingga menyebabkan kondisi lahan pertanian tidak produktif dan

tentunya aktivitas perekonomian masyarakat menjadi terganggu. Dampak yang ditimbulkan akibat krisis pangan juga dirasakan bagi kelompok masyarakat yang mendiami wilayah perkotaan. Rata-rata dari mereka memperoleh bahan pangan dari para petani yang dengan mudah dapat dijumpai dipasaran, akan tetapi setelah situasi semakin memburuk, kelangkaan bahan pangan mulai dirasakan oleh mayoritas penduduk Malawi baik diwilayah pedesaan maupun perkotaan. Dengan pola kelembagaan yang bersifat kelompok tentunya jika suatu kelompok terdampak krisis, maka kelompok lainnya juga dalam kondisi yang rentan terdampak. Khususnya bagi kondisi yang terjadi Malawi yang rata-rata penduduknya mendiami wilayah pedesaan yang kehidupan sosial sehari-hari masyarakatnya sangat erat.

Mayoritas penduduk Malawi merupakan kelompok bermata pencaharian sebagai petani. Ketika situasi krisis pangan melanda Malawi akibat bencana dan fenomena iklim pada rentang tahun 2015-2017 tersebut membuat kondisi sosial masyarakat Malawi menjadi terganggu. Bencana kekeringan di Malawi setidaknya menyebabkan kerentanan sosial yang memprihatinkan. Masyarakat yang terdampak bencana kekeringan dan krisis pangan tersebut dikhawatirkan menyebabkan keadaan sosial yang semakin terpuruk (Euan James Innes, 2021). Hampir seluruh masyarakat Malawi mengkonsumsi jagung sebagai sumber pangan harian. Akibat bencana tersebut membuat lahan pertanian jagung masyarakat menjadi terdampak hingga menyebabkan gagal panen. Akibatnya, banyak diantara masyarakat

tersebut yang tidak memperoleh bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan harian.

Kerentanan sosial akibat krisis pangan tersebut tentu berdampak pada berbagai sektor kehidupan lainnya seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Persoalan krisis ini terasa seperti efek domino yang dengan cepat ikut meruntuhkan sektor lainnya. Kebutuhan terhadap pangan tentu dapat berakibat pada kemudahan dan kelancaran dalam memenuhi aspek-aspek kehidupan lainnya. Apabila situasi ini tidak segera ditindaklanjuti dengan cepat dan segera oleh pemerintah, makan dikhawatirkan kondisi sosial kemasyarakatan di Malawi menjadi semakin terpuruk hingga ke titik terendah.

Berbicara mengenai sektor sosial kemasyarakatan, tentu tidak segampang yang dibayangkan. Dengan berbagai macam karakter dan tatanan sosial tentu akan membuat situasi krisis pangan semakin sulit untuk dikendalikan. Akan tetapi, yang paling penting dalam hal tersebut adalah keadaan masyarakat Malawi kian terpuruk yang dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat di Malawi akibat krisis tersebut (Monica Fisher, 2015). Perlu adanya suatu langkah yang tepat untuk dapat mengembalikan tatanan sosial masyarakat ke arah yang lebih positif. Bagi seluruh kelompok sosial yang ada di Malawi, sangat mengharapkan adanya upaya yang cepat dari pemerintah untuk dapat memperbaiki situasi yang terjadi secara tepat sebagai langkah dalam melindungi seluruh masyarakat Malawi. Mereka mempercayai bahwa pemerintah Malawi akan dapat mengatasi situasi tersebut secara efektif dan cepat, maka dari itu mereka bersedia membantu pemerintah dalam

mengatasi situasi sulit tersebut dengan cara menjalin hubungan yang bersinergi antara masyarakat dan pemerintah (Calvel Alexia, 2020). Banyak LSM diberbagai distrik terdampak bencana juga menyatakan diri bersedian untuk dapat membantu pemerintah distrik, provinsi, dan pusat dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan selama situasi krisis melanda (Hamel 2019). Pihak-pihak LSM bersama dengan masyarakat adat diharapkan oleh pemerintah mampu membantu dan ikut terlibat pada seluruh proses yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Pemerintah Malawi menargetkan terjadinya angka pertumbuhan di masyarakat pada sektor sosial dan ekonomi. Pemerintah sangat berharap pada upaya tersebut setidaknya untuk dapat memulihkan situasi krisis pada sektor sosial kemasyarakatan (Jeanne Y. Coulibaly, 2017). Harapannya adalah, dengan situasi sosial masyarakat yang mampu dikendalikan, maka pada sektor lainnya juga akan mengalami sejumlah kemajuan untuk dapat menyelesaikan situasi krisis tersebut menjadi lebih cepat dan tepat. Dalam mencapai tujuan tersebut tentu sangat dibutuhkan peran serta dan hubungan yang baik antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Malawi.

3.2.3 Proses Pengambilan Kebijakan dalam Krisis Pangan Malawi

Menurut Snyder, pada tahapan pengambilan kebijakan (*the decision making process*) merupakan indikator yang menjadi jembatan antara faktor internal maupun faktor eksternal dalam sebuah perumusan kebijakan. Faktor internal dan eksternal dalam sebuah pengambilan kebijakan yang dilakukan

oleh aktor hubungan internasional merupakan inti pemikiran yang dapat diwujudkan melalui proses pengambilan kebijakan (Richard C. Snyder, 2002). Pada tahapan ini membutuhkan kecermatan dari setiap aktor pembuat kebijakan untuk dapat merencanakan dan merumuskan berbagai kebijakan yang bersifat penting demi terwujudnya sebuah tatanan negara yang baik.

Menyikapi situasi sulit yang melanda Malawi tersebut tentu membutuhkan peranan aktor yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan untuk segera dapat mengatasi situasi sulit tersebut. Pemerintah dalam hal ini adalah pihak yang berwenang untuk memutuskan berbagai langkah penting termasuk membuat kebijakan terkait penanganan situasi krisis yang cepat dan tepat. Hubungan yang baik antar institusi dan lembaga negara perlu untuk dikedepankan untuk dapat bekerjasama dalam menghadapi situasi krisis tersebut. Peranan beberapa aktor dalam sebuah negara sangat diperlukan untuk dapat saling memberikan dampak yang positif demi terwujudnya situasi negara yang dapat dikendalikan dan mampu membuat negara keluar dari situasi krisis pangan tersebut.

Umumnya pada suatu negara tentu memiliki beberapa instrumen penting yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Pemerintah pusat merupakan aktor penting dan krusial dalam sebuah tatanan negara untuk dapat memutuskan terkait berbagai kebijakan penting bagi negaranya. Namun, peranan pemerintah pusat saja tidak mampu terlaksana dengan baik bila hubungan terhadap institusi terkait lainnya tidak bersinergi dengan baik. Pemerintah harus menghimpun seluruh kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya untuk dapat secara bersama-sama dalam menghadapi maupun

menyelesaikan persoalan krisis tersebut. Hubungan yang baik juga tidak hanya berhenti pada aspek pemerintah semata, namun masyarakat juga perlu dilibatkan dalam usaha dan upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan krisis pangan. Dengan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu untuk dapat menyelesaikan keadaan tersebut lebih cepat dan optimal.

Dalam menghadapi situasi krisis pangan akibat terjadinya bencana kekeringan dan fenomena iklim tersebut, pemerintah pusat melalui beberapa kementerian terkait telah melaksanakan berbagai langkah dan kebijakan penting. Proses-proses tersebut didahului oleh adanya laporan yang diterima dari masyarakat mengenai situasi yang sedang terjadi dibeberapa wilayah di Malawi. Masyarakat mengalami dampak akibat bencana kekeringan dan fenomena iklim tidak biasa tersebut khususnya pada kelompok petani. Mereka mengeluhkan adanya kondisi lahan yang tidak optimal untuk dapat memproduksi bahan kebutuhan pangan. Kondisi tersebut ternyata berdampak pada situasi kelangkaan dan krisis bahan pangan di pasaran hingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mampu menjangkaunya. Keadaan tersebut juga diperparah dengan adanya hambatan dan gangguan pada berbagai sektor kehidupan yang kian mengancam situasi sosial masyarakat Malawi.

Informasi mengenai situasi tersebut kemudian disampaikan pada pemerintah distrik/kabupaten untuk segera dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi situasi tersebut. Penyampaian informasi tersebut tidak hanya dilakukan langsung oleh masyarakat terdampak, namun juga dihimpun oleh

beberapa LSM dan organisasi sosial yang hadir pada situasi tersebut untuk mengakomodasi keluhan masyarakat. Kemudian, di tingkat pemerintah distrik hal tersebut dibahas secara mendalam untuk kemudian dilaporkan pada pemerintah pusat melalui berbagai kementerian terkait. Banyaknya laporan mengenai situasi dan kondisi yang sedang terjadi tersebut semakin memudahkan pemerintah untuk segera hadir dalam upaya menyelesaikan situasi tersebut. Masyarakat tentu sangat bergantung kepada peranan pemerintah sebagai otoritas yang berfungsi untuk mengakomodasi berbagai keluhan dan kepentingan masyarakat negaranya.

Langkah cepat juga kemudian dilakukan di tingkat pemerintah melalui berbagai rapat dan pembicaraan antar kementerian. Pemerintah menyepakati untuk segera mengeluarkan kebijakan penting agar situasi dan kondisi di tengah-tengah masyarakat dapat tetap kondusif. Kemudian, antar lembaga yang berwenang memutuskan untuk segera membentuk tim penanggulangan bencana yang dipimpin oleh Departemen Penanggulangan Bencana Nasional. Tim tersebut bertugas untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat mengenai situasi yang terjadi juga berikut dengan langkah preventif terhadap upaya pencegahan dan mitigasi bencana (Nancy McCarthy, 2018).

Dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan tidak dapat hanya mengandalkan satu alat utama saja, namun juga perlu adanya hubungan yang bersifat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terdampak. Dengan demikian hasil berupa berbagai kebijakan dalam mengatasi situasi tersebut dapat dirasakan oleh seluruh elemen

masyarakat di Malawi. Hal penting lainnya adalah pemerintah harus terus hadir dan berupaya maksimal dalam menjawab keluhan maupun kebutuhan masyarakatnya tanpa terkecuali.

Respon serupa kemudian juga disampaikan oleh parlemen Malawi, seluruh partai yang ada diparlemen sangat mengharapkan adanya upaya yang tepat dari pemerintah sebagai respon dalam menyelesaikan persoalan krisis pangan. Parlemen sangat mendukung seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sebagai wakil rakyat dari seluruh distrik yang ada di Malawi, mereka mengharapkan adanya peranan pemerintah yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat Malawi tanpa membedakan unsur apapun. Partai Progresif Demokratik (DPP), meyakini bahwa pemerintah Malawi dibawah kepemimpinan Pether Mutharika mampu menyelesaikan persoalan tersebut dengan tepat melalui kebijakan-kebijakan yang strategis, mereka juga berpandangan bahwa Malawi akan mampu bangkit dan keluar dari situasi sulit tersebut dengan cepat (Jan Duchoslav, 2021). Parlemen menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama masa tanggap darurat krisis merupakan hal yang perlu untuk didukung demi terwujudnya situasi negara yang aman dan masyarakat yang sejahtera serta mampu keluar dari situasi sulit dengan cepat (Kita, 2017).

3.2.4 Tindakan Pemerintah dalam Krisis Pangan Malawi

Situasi krisis pangan akibat bencana kekeringan dan fenomena iklim yang melanda Malawi sejak tahun 2015-2017 telah membuat negara ini

menjadi semakin terpuruk. Berbagai sektor kehidupan masyarakat menjadi terganggu dan berada pada kondisi yang tidak stabil. Keadaan tersebut juga semakin memaksa masyarakat untuk berada pada situasi sulit hingga ke titik terendah selama negara ini berdiri. Kehidupan masyarakat Malawi yang mayoritas sebagai petani jagung berada pada keadaan yang mengkhawatirkan akibat hampir seluruh lahan pertanian masyarakat tidak produktif dan gagal panen.

Masyarakat menaruh perhatian dan harapan besar kepada pemerintah untuk dapat menjawab keluhan mereka dan mampu mengatasi situasi sulit tersebut secara tepat. Sesaat setelah menerima informasi dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, pemerintah dan beberapa instansi terkait telah melaksanakan pertemuan untuk membahas mengenai langkah dan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan situasi krisis tersebut. Sebagai langkah awal proses mitigasi bencana, pemerintah telah menetapkan situasi tanggap darurat bencana kekeringan dan krisis pangan nasional (T.D Hendriks, 2019). Melalui siaran persnya, presiden Peter Mutharika menyampaikan kepada seluruh masyarakat Malawi mengenai status dan kondisi yang tengah dihadapi oleh Malawi tersebut.

Dengan ditetapkannya situasi tanggap darurat bencana kekeringan dan krisis pangan nasional, membuat Malawi sangat mengharapkan adanya bantuan dari pihak luar untuk bersama-sama dalam berusaha mengatasi situasi sulit tersebut. Pemerintah sadar bahwa mereka memiliki sejumlah keterbatasan dalam berupaya maksimal untuk segera mengatasi situasi krisis tersebut. Akan tetapi, pemerintah tetap berupaya secara optimal dalam

menjawab keluhan masyarakat pada keadaan krisis. Status tanggap darurat bencana kekeringan dan krisis pangan nasional tersebut yang dijadikan dasar pemerintah Malawi untuk segera menghubungi pihak-pihak terkait terutama instrumen internasional dalam membantu Malawi menyelesaikan persoalan tersebut (Arielle S.Tozier de la Poterie, 2018).

Setelah siaran pers presiden mengenai situasi dan kondisi yang dihadapi Malawi, bantuan kemanusiaan global mulai hadir dan membantu pemerintah dalam situasi sulit tersebut. Bantuan tersebut datang dari berbagai pihak baik IGO's, NGO's, ataupun perorangan. Pemerintah betul-betul mengharapkan adanya uluran tangan atas nama kemanusiaan dalam usaha mengatasi situasi krisis dan darurat bencana tersebut. Beberapa bantuan tersebut meliputi:

a. Bantuan distribusi ketersediaan pangan
b. Bantuan keuangan
c. Donor kemanusiaan berupa relawan dari berbagai organisasi internasional
d. Bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak
e. Bantuan tim memanajemen risiko bencana

Khusus yang terakhir, pemerintah Malawi sadar terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam memanajemen risiko bencana. Oleh karenanya, pemerintah membuka akses seluas-luasnya kepada berbagai pihak untuk ikut membantu upaya Malawi dalam menyelesaikan persoalan tersebut melalui manajemen kebencanaan (Ozius Dewa, 2021).

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Malawi merupakan hasil yang telah disepakati bersama antar pihak-pihak dan institusi di Malawi.

Pengambilan kebijakan tersebut tentu berdasarkan faktor-faktor yang yang sedang terjadi di Malawi dengan memperhatikan beberapa indikator dalam pengambilan keputusan yang telah dibahas sebelumnya. Berikut adalah kebijakan yang berhasil dirumuskan oleh pemerintah Malawi dalam upaya menyelesaikan persoalan krisis pangan tersebut:

Tabel 2. Kebijakan Pemerintah

No.	Lembaga/institusi	Kebijakan
1	Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan	a) Melaksanakan program penyuluhan dan pemantauan wilayah lahan pertanian terdampak. b) Melaksanakan program pertanian konservasi kepada masyarakat. c) Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk melaksanakan percepatan program teknologi pertanian. d) Mempercepat proses distribusi bantuan pangan.
2	Kementerian Kehutanan dan Sumber Daya Alam	a) Mengeluarkan program NAPA (*National Adaptation of Action*). b) Melaksanakan program rekonstruksi lahan pertanian yang meliputi: - Mengendalikan pendangkalan air - Menyediakan lahan irigasi pertanian baru - Penghijauan kembali lahan terdampak
3	Kementerian Kesehatan	a) Mempercepat program pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak melalui layanan *One Stop Care*. b) Melaksanakan upaya intervensi kebutuhan gizi masyarakat selama masa tanggap darurat. c) Memperkenalkan EWS's (*Early Warning Systems*) kepada masyarakat.
4	Kementerian Keuangan	Membuka layanan bantuan finansial kemanusiaan dari pihak internasional.

5	Departemen Penanggulangan Bencana Nasional	a) Membuka akses bantuan kemanusiaan global. b) Mempercepat upaya tanggap darurat bencana. c) Merumuskan strategi manajemen risiko bencana.
6	Departemen Perubahan Iklim dan Layanan Metorologi	Memberlakukan kebijakan pemberian informasi prakiraan cuaca dan iklim harian kepada petani dan masyarakat secara berkala melalui berbagai *platform* informasi.

3.2.5 Faktor Eksternal dalam Pengambilan Kebijakan Krisis Pangan Malawi

Faktor eksternal adalah indikator penting bagi setiap aktor hubungan internasional dalam merumuskan kebijakannya. Sejalan dengan pentingnya faktor internal, kedua indikator ini tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. Dalam proses perumusan kebijakan tentu kondisi dalam negeri dan kondisi luar negeri akan sangat berkaitan. Bagi seorang aktor pembuat kebijakan, kondisi eksternal merupakan cerminan negara dalam ikut serta pada terwujudnya tatanan global yang lebih baik.

Pada situasi krisis pangan yang melanda Malawi tersebut, dunia internasional juga sedang gencar membahas mengenai isu kedaulatan pangan di negara-negara ketiga. Negara ketiga saat ini sedang dihadapkan pada keadaan iklim yang tidak menentu hingga berakibat pada kondisi kerentanan terhadap ketahanan pangan. Khususnya di Afrika, kondisi kerentanan terhadap ketahanan pangan masih menghantui hampir seluruh negara di benua hitam tersebut. Malawi adalah salah satu negara di Afrika yang cukup rentan terhadap kasus ketahanan pangan. Sebagai negara dengan kondisi

geografis yang kurang beruntung seperti Malawi, kondisi kerentanan terhadap ketersediaan bahan pangan yang layak konsumsi merupakan salah satu pemicu negara ini semakin terbelakang (Solomon Asfaw, 2015). Perlu adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk dapat menghadapi situasi tersebut dengan cermat dan dapat menghimpun hajat hidup orang banyak dengan baik dan layak.

Dewasa ini, dunia semakin hangat dengan perbincangan mengenai jaminan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana suatu negara juga wajib untuk dapat menyediakan dan memberikan akses yang mudah bagi seluruh penduduknya dalam menjangkau kebutuhan pangan. Terwujudnya hak asasi manusia merupakan cita-cita yang tengah digagas oleh seluruh negara di dunia untuk segera mencapai tatanan global yang setara dan berimbang. Belakangan, dunia internasional tidak hanya fokus terhadap pemenuhan hak asasi semata, namun juga bagaimana mewujudkan negara-negara di dunia sebagai negara yang sejahtera (*welfare*) (M.J Tembo, 2015). Ketika banyak negara semakin memfokuskan diri terhadap upaya tersebut, maka seluruh indikator terhadap pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia harus terlaksana dengan baik.

Saat ini fokus dunia tidak hanya sebatas dalam usaha negara untuk menjamin terwujudnya pemenuhan hak asasi dan *welfare state*, namun juga telah bergeser ke arah yang lebih serius yaitu *sustainable development goals* (SDGs). Banyak negara di dunia yang sedang gencar dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan agar terciptanya situasi global yang lebih baik. Indikator yang tercantum pada konsep SDGs telah memuat beberapa poin

penting terutama dalam menjamin terciptanya hak asasi dan keamanan manusia yang lebih merata (Dan Banik, 2019). Salah satu pilar utama SDGs membahas mengenai *food security* (ketahanan pangan). Sebagaimana yang telah disepakati bersama bahwa negara yang berdaulat tidak hanya mencakup terhadap wilayah dan pemerintahan saja, akan tetapi juga mencakup terhadap pemenuhan kebutuhan pangan yang layak bagi masyarakat.

Dari beberapa fokus dunia internasional di atas, pemerintah Malawi cukup kesulitan dalam mewujudkannya di tengah situasi sulit akibat krisis pangan dan sumber daya yang terbatas. Maka dari itu, dalam merumuskan kebijakan terhadap pemulihan krisis dan tanggap darurat bencana nasional, pemerintah menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dan instrumen internasional untuk dapat memberikan bantuan dan perhatian terhadap situasi yang terjadi. Dengan banyaknya pihak yang berupaya untuk membantu Malawi dalam menghadapi situasi krisis tersebut, maka visi terhadap usaha pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia, menuju negara yang sejahtera, serta selaras dengan visi SDGs dapat dengan mudah dilaksanakan.

Melalui berbagai institusi dan lembaga terkait, telah menyepakati beberapa langkah untuk memulihkan situasi dan kondisi Malawi di tengah krisis pangan dan tanggap darurat bencana kekeringan tersebut. Selain mengeluarkan kebijakan terhadap upaya bantuan internasional untuk mencukupi kebutuhan pangan dan pembiayaan, Malawi juga membutuhkan bantuan pemikiran dari berbagai pihak dalam memanajemen risiko bencana dan tanggap darurat bencana yang selama ini belum mampu untuk dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Malawi.

BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Riset ini telah berupaya untuk menjawab rumusan masalah bagaimana langkah dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Malawi dalam berupaya menyelesaikan persoalan krisis pangan. Melalui teori *decision making* oleh Richard Snyder, riset ini telah menguraikan sejumlah faktor yang mendorong dirumuskannya berbagai kebijakan dalam upaya memulihkan situasi krisis yang terjadi.

Sebagai pemangku kepentingan dan aktor pembuat kebijakan, pemerintah Malawi telah mengupayakan segala kemampuan yang ada beserta dengan sumber daya yang dimilikinya untuk dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut. Tentunya dengan memperhatikan berbagai macam faktor penting dalam sebuah proses perumusan kebijakan, diharapkan mampu menyelesaikan persoalan tersebut secara tepat.

Malawi adalah salah satu negara miskin di dunia yang mengalami berbagai macam persoalan domestik yang kian membuat negara ini semakin terpuruk. Kekeringan berkepanjangan akibat fenomena alam dan iklim global telah membuat negara ini kian tak berdaya. Sebagian besar penduduk Malawi adalah kelompok bermata pencaharian sebagai petani yang sangat menggantungkan sepenuhnya dari kondisi alam. Namun, setelah fenomena ini menghantam Malawi, banyak penduduk yang kemudian menjadi terdampak hingga ke titik terparah.

Masyarakat sangat mengharapkan adanya upaya dan langkah yang cepat dari pemerintah dan segenap pemangku kepentingan untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Situasi krisis tentu bukanlah hal yang diinginkan oleh masyarakat Malawi, akan tetapi dengan situasi yang terjadi tersebut, mereka sangat mengharapkan peranan pemerintah agar segera dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara cepat dan tepat. Hal tersebut tentu bukanlah perkara yang mudah, karena dengan segala keterbatasan yang ada tentu akan membuat pemerintah Malawi mengalami sejumlah kesulitan dan hambatan dalam proses penyelesaian krisis tersebut. Pemerintah telah mengupayakan berbagai macam usaha untuk segera memulihkan krisis tersebut. Melalui kebijakan yang penting dan strategis bersama dengan pihak terkait, diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan dan penyelesaian situasi krisis pangan tersebut. Pemerintah Malawi tidak akan mampu dengan sendirinya dalam mengatasi persoalan ini. Oleh karena itu, bantuan dan perhatian serta dukungan instrumen internasional akan memberikan kemudahan dan kelancaran bagi pemerintah Malawi untuk menyelesaikan situasi krisis. Jalinan hubungan komunikasi antar negara dan organisasi internasional sangat diharapkan untuk dapat segera mengatasi persoalan tersebut.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat yang mendiami suatu negara. Oleh karenanya, pemerintah sebagai aktor penting dalam sebuah proses perumusan kebijakan sangat diharapkan untuk dapat menghimpun seluruh aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya demi terwujudnya sebuah tatanan negara yang

lebih baik. Terlebih dewasa ini isu mengenai kesejahteraan sosial dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia sedang gencar diperbincangkan oleh berbagai pihak. Maka dari itu, sebagai aktor yang berwenang dalam merumuskan kebijakan yang penting dan strategis bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang lebih baik, diperlukan kecakapan dan kemampuan yang baik dari aktor pembuat kebijakan. Berbagai usaha dan upaya tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman dan ketenangan bagi seluruh masyarakat Malawi yang terdampak situasi krisis tersebut untuk segera bangkit dan keluar dari kondisi terpuruk.

4.2 Rekomendasi

Riset ini secara spesifik membahas mengenai kebijakan pemerintah Malawi dalam menyelesaikan persoalan krisis pangan pada tahun 2017 berdasarkan teori pembuatan kebijakan (*the decision making*) yang dikemukakan oleh Richard Snyder. Pada penelitian ini juga membahas mengenai dampak yang ditimbulkan akibat krisis pangan tersebut yang mempengaruhi stabilitas keamanan kesehatan masyarakat di Malawi. Meski demikian, riset ini memiliki keterbatasan dalam menyentuh dampak lainnya yang ditimbulkan akibat krisis pangan berkepanjangan. Terdapat sejumlah peluang pengembangan riset yang dapat dilakukan di masa mendatang, di antaranya mencakup:

1. Dampak yang ditimbulkan akibat krisis pangan di Malawi pada sektor pendidikan
2. Dampak yang ditimbulkan akibat krisis pangan di Malawi pada sektor politik dan pemerintahan
3. Dampak yang ditimbulkan akibat krisis pangan di Malawi dalam mewujudkan upaya mendukung *sustainable development goals* di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2019. *Kesejahteraan Sosial.* 2. Rajawali Pers.

Ala, Ambo. n.d. *Krisis Pangan Global dan Alternatif Solusinya (Bagian II).* Accessed Oktober 19, 2020. http://wantimpres.go.id/?p=1391&lang=id.

Aljazeera, News Agencies of. 2016. *Malawi declares a state of emergency over drought.* April 14. https://www.aljazeera.com/news/2016/4/14/malawi-declares-state-of-emergency-over-drought.

Arielle S.Tozier de la Poterie, Wasswa Eddie Jjemba, Roop Singh, Erin Coughlan de Perez, Cecilia V.Costella & Julie Arrighi. 2018. "Understanding the use of 2015–2016 El Niño forecasts in shaping early humanitarian action in Eastern and Southern Africa." *Elsevier* 30: 81-94. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.02.025.

Benjamin T. Wood, Claire H. Quinn, Lindsay C. Stringer & Andrew J. Dougill. 2017. "Investigating Climate Compatible Development Outcomes and their Implications for Distributive Justice: Evidence from Malawi." *Environmental Management* 60: 436-453. doi:https://doi.org/10.1007/s00267-017-0890-8.

Calvel Alexia, Werner Micha, van den Homberg Marc, Cabrera Flamini Andrés, Streefkerk Ileen, Mittal Neha, Whitfield Stephen, Langton Vanya Charles, Boyce Clement. 2020. "Communication Structures and Decision-Making Cues and Criteria to Support Effective Drought Warning in Central Malawi." *Frontiers in Climate* 2: 16. doi:10.3389/fclim.2020.578327 .

Dan Banik, Michael Chasukwa. 2019. "The Politics of Hunger in an SDG Era: Food Policy in Malawi." *Food Ethics* 4: 189-206. doi:https://doi.org/10.1007/s41055-019-00055-3.

Erwin Knippenberg, Nathan Jensen, Mark Constas. 2017. "Measuring Resilience in Malawi."

Euan James Innes, Robert Sakic Trogrlic, Lindsay C. Beevers. 2021. "Chapter 1.4 - Social Vulnerability to Drought in Rural Malawi." *Understanding Disaster Risk* (Elsevier) 81-107. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819047-0.00006-8.

Festus O. Amadu, Paul E. McNamara, Kristin E. Davis. 2021. "Soil health and grain yield impacts of climate-resilient agriculture projects: Evidence from southern Malawi." *Agricultural Systems* (Elsevier) 193. doi:https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103230.

Food Agriculture Organization. n.d. *Nutrition Country Profiles: Malawi.* Accessed Oktober 19, 2020. http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/mwi_en.stm.

Hamel, Reid. 2019. "Drought-Ravaged Malawi Faces Largest Humanitarian Emergency in its History." *Gates Open Research* 3. doi:https://doi.org/10.21955/gatesopenres.1115133.1.

Holden, Stein T., and Monica Fisher. 2015. "Subsidies promote the use of drought tolerant maize varieties despite variable yield performance under smallholder environments in Malawi." *Food Security* 7: 1225-1238. doi:https://doi.org/10.1007/s12571-015-0511-4 .

Irawan, Bambang. 2006. "Fenomena Anomali Iklim El Nino dan La Nina:Kecenderungan Jangka Panjang dan Pengaruhnya terhadap Produksi Pangan." *Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 24 No.1* 29.

Jan Duchoslav, Edwin Kenamu & Jack Thunde. 2021. "Targeting hunger or votes? The political economy of humanitarian transfers in Malawi." 21.

Jeanne Y. Coulibaly, Glwadys A. Gbetibouo, Godfrey Kundhalane, Gudeta W. Sileshi & Tracy L. Breedy. 2017. "Responding to Crop Failure: Understanding Farmers' Coping Strategies in Southern Malawi." *Sustainability* 7 (2): 1620-1636. doi: https://doi.org/10.3390/su7021620.

Jhon B. Mason, Adam Bailes, Karen E. Mason, Olivia Yambi, Urban Jonsson, Claudia Hudspeth, Peter Hailey, Andrea Kandle, Dominique Brunet & pierre Martel. 2007. "AIDS, drought, and child malnutrition in southern Africa." *Public Health Nutrition* 8 (6): 551-563. doi:doi:10.1079/PHN2005726.

Kalinga, Zimani David Kadzamira & Owen Jato. n.d. *Malawi.* Accessed Oktober 19, 2020. https://www.britannica.com/place/Malawi.

Kita, Stern Mwakalimi. 2017. "Government doesn't have the muscle": state, NGOs, local politics, and disaster risk governance in Malawi." *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy* (Wiley Online Library) 8 (3): 244-267.

Lestari, Tri Rini Puji. 2020. "Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 11 (1): 58. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1523/pdf.

M.J Tembo, Oltedal. S. 2015. "Social work and families in child welfare in Malawi: social workers considerations when placing a child outside the home." *Journal of Comparative Social Work* (Department of social work, University of Stavanger) 15 (1). http://hdl.handle.net/11250/293181.

Madani, Tilele Stevens & Kaveh. 2016. "Future climate impacts on maize farming and food security in Malawi." *Scientific Reports* 6. doi:https://doi.org/10.1038/srep36241.

Manda, Mtafu Zeleza. 2014. "Where there is no local government: addressing disaster risk reduction in a small town in Malawi." *Environment and Urbanization* 26 (2): 586-599. doi:https://doi.org/10.1177/0956247814530949.

Monica Fisher, Tsedeke Abate, Rodney W. Lunduka, Woinishet Asnake, Yoseph Alemayehu & Ruth B. Madulu. 2015. "Drought tolerant maize for farmer adaptation to drought in Sub-Saharan Africa: Determinants of adaptation in Eastern and Southern Africa." *Climate Change* 133: 283-299. doi:https://doi.org/10.1007/s10584-015-1459-2.

Mudrieq, Sulfitri Hs. 2014. "Problematika Krisis Pangan Dunia dan Dampaknya Bagi Indonesia." *ACADEMIA FISIP UNTAD* 5 (2): 1287-1302. https://media.neliti.com/media/publications/28578-ID-problematika-krisis-pangan-dunia-dan-dampaknya-bagi-indonesia.pdf.

Nancy McCarthy, Talip Kilic, Alejandro de la Fuente & Joshua M. Brubaker. 2018. "Shelter from the Storm? Household-Level Impacts of, and Responses to, the 2015 Floods in Malawi." *Economics of Disasters and Climate Change* 2: 237-258. doi:https://doi.org/10.1007/s41885-018-0030-9.

News, UN. 2016. *Malawi facing worst food crisis in a decade, requires $81 million in relief aid* . https://www.un.org/africarenewal/news/malawi-facing-worst-food-crisis-decade-requires-81-million-relief-aid-%E2%80%93-un-agency.

Ozius Dewa, Donald Makoka & Olalekan A. Ayo-Yusuf. 2021. "Assessing Capacity and Implementation Status of the Disaster Risk Management Strategy for Health and Community Disaster Resilience in Malawi." *International Journal of Disaster Risk Science* 12: 673-688. doi:https://doi.org/10.1007/s13753-021-00369-z.

Pertiwi, Nuning Indah. 2017. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1 (2). https://www.google.com/search?safe=strict&hl=id&biw=1366&bih=625&sxsrf=ALeKk02-vonosHlT_xcsPwAAaI28QJ-lKg%3A1609081759671&ei=n6PoX8ewKJKKmgfUx7uICg&q=jurnal+definisi+data+sekunder&oq=jurnal+definisi+data+sekunder&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOgQIABBHOgQ.

Philipose, Anandita. 2018. *Chapter Thirteen. Policy Implications of Droughts and Food Insecurity in Malawi and Zambia (7-3).* Edited by Per Pinstrup Andersen & Fuzhi Cheng. Ithaca: NY: Cornell University Press. doi:https://doi.org/10.7591/9780801466373-016.

Rahmat, Pupu Saeful. 2009. "Penelitian Kualitatif." *EQUILIBRIUM* 5 (9). http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.

Richard C. Snyder. 2002. *Foreign Policy Decision-Making.* New York: Palgrave Macmillan.

Solomon Asfaw, Nancy McCarthy, Leslie Lipper, Aslihan Arslan, Andrea Cattaneo & Mutie Kachulu. 2015. "Climate variability, adaptation strategies and food security in Malawi." *AgEcon Search* 76. doi:10.22004/ag.econ.210961.

Spark, Contributor of Weather. 2021. *Climate and Average Weather Year Round in Blantyre, Malawi.* November 02. https://weatherspark.com/y/98672/Average-Weather-in-Blantyre-Malawi-Year-Round.

T.D Hendriks, F.K Boersma. 2019. "Bringing the state back in to humanitarian crises response: Disaster governance and challenging collaborations in the 2015 Malawi flood response." *Elsevier* 40. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101262.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik.* 1. Universitas Moestopo Beragama Pers.

Thomas, Caroline. 2000. *Global Governance, Development, and Human Security.* 1. Vol. 1. Pluto Pers.

World Bank Group, United Nations, and European Union. 2016. *Malawi Drought 2015-2016: Post-Disaster Needs Assessment (PNDA).* Washington DC: Global Facility for Disaster Reduction and Rocovery (GFDRR).

World Health Organization. n.d. *Health Profile Malawi.* Accessed Oktober 19, 2020. https://www.worldlifeexpectancy.com/country-healthprofile/malawi. 2016. *The Global Health Observatory.* https://www.who.int/data/gho/data/countries/countrydetails/GHO/malawi?countryProfileId=3d12e768-34b8-4076-bdc7-061df3ce5f10.